



BRMP SDLP

**BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI
SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN**

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025 (AUDITED)



Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya
Lahan Pertanian
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Kementerian Pertanian

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bogor, 31 Desember 2025
Kepala Balai Besar,

Asdianto, S.P., M.T.
NIP 197801012002121006



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12, CIMANGGU, BOGOR 16114
TELEPON: (0251) 8323011 – 8323012, FAKSIMILI: (0251) 8311256
WEBSITE: sdlahan.brmp.pertanian.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Bogor, 31 Desember 2025
Kepala Balai Besar,

Asdianto, S.P., M.T.
NIP 197801012002121006

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	I
Pernyataan Tanggung Jawab	II
Daftar Isi	III
Daftar Lampiran	IV
Daftar Tabel	V
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	31
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	42
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	73
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	88
F. Pengungkapan Lain - lainnya	98
VI. Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rincian Perbandingan Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Per 31 Desember 2025
Lampiran 2	Rincian Pendapatan Berdasarkan Jenis Pendapatan
Lampiran 3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
Lampiran 4	Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Berdasarkan Program Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
Lampiran 5	Jumlah dan Komposisi Pegawai Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian 31 Desember 2025
Lampiran 6	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
Lampiran 7	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
Lampiran 8	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025
Lampiran 9	Laporan Data Rekening Pemerintah Pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian Per 31 Desember – Bendahara Pengeluaran
Lampiran 10	Laporan Data Rekening Pemerintah Pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian Per 31 Desember 2025 –Rekening Lainnya
Lampiran 11	Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025
Lampiran 15	Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025
Lampiran 16	Monitoring Penetapan Status Penggunaan BMN Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian Berdasarkan Data Pada Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Per Tanggal 31 Desember 2025

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel B.1	Anggaran dan Realisasi PNPB TA 2025	31
Tabel B.1.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025	32
Tabel B.1.2.1	Anggaran dan Realisasi PNPB Lainnya Semester II TA 2025	32
Tabel B.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025	35
Tabel B.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025 Berdasarkan Program	35
Tabel B.2.1.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025	36
Tabel B.2.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025	37
Tabel B.2.2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis Yang Menghasilkan Barang Persediaan	38
Tabel B.2.3.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun 2025	39
Tabel B.2.3.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025	40
Tabel B.2.3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2025	40
Tabel B.2.3.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan Semester II TA 2025	41
Tabel B.2.3.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II TA 2025	41
Tabel C.1	Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	42
Tabel C.2	Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	43
Tabel C.3.1	Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	44
Tabel C.4.1	Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	46
Tabel C.4.2	Mutasi Tambah dan Kurang Kas pada BLU	46
Tabel C.5.1	Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	47
Tabel C.6.1	Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	47
Tabel C.6.2	Perhitungan Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 seharusnya	48
Tabel C.7.1	Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	49
Tabel C.8.1	Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	49
Tabel C.9.1	Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	50
Tabel C.10.1	Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	51
Tabel C.11.1	Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	51

Tabel C.12.1	Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	52
Tabel C.13	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	53
Tabel C.13.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah	53
Tabel C.13.2	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin	55
Tabel C.13.3	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan	57
Tabel C.13.4	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan	59
Tabel C.14.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya	60
Tabel C.15.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan	61
Tabel C.16.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	62
Tabel C.17.1	Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	63
Tabel C.18.1	Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	63
Tabel C.19.1	Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	64
Tabel C.20.1	Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	64
Tabel C.23.1	Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	65
Tabel C.24.1	Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	66
Tabel C.25.1	Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	66
Tabel C.25.2	Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset	67
Tabel C.26.1	Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024	67
Tabel C.27.1	Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	68
Tabel C.28.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	69
Tabel C.29.1	Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	70
Tabel C.30.1	Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024	70
Tabel C.31.1	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024	71
Tabel D.1	Kegiatan Operasional Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian Tahun 2025 dan 2024	73
Tabel D.1.1	Pendapatan BLU Semester II Tahun 2025 dan TA 2024	74
Tabel D.1.2	Perbandingan Pendapatan BLU Semester II Tahun 2025 dan TA 2024	74
Tabel D.3.1.1	Beban Pegawai Tahun 2025 dan TA 2024	75
Tabel D.3.1.2	Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Semester II Tahun 2025 di LRA dengan LO	75
Tabel D.4.1	Beban Persediaan Semester I TA 2025 dan TA 2024	76
Tabel D.4.2	Perbandingan Belanja dan Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO	77
Tabel D.5.1	Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2025 dan TA 2024	78
Tabel D.5.2	Perbandingan Belanja dan Beban Barang dan Jasa Semester II Tahun 2025 di LRA dengan LO	78
Tabel D.6.1	Beban Pemeliharaan Semester II TA 2025 dan TA 2024	79

Tabel D.6.2	Perbandingan Belanja dan Beban Pemeliharaan Semester II Tahun 2025 di LRA dengan LO	79
Tabel D.7.1	Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2025 dan TA 2024	80
Tabel D.7.2	Perbandingan Belanja dan Beban Perjalanan Dinas Semester II Tahun 2025 di LRA dengan LO	80
Tabel D.8.1	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II Tahun 2025 dan 2024	81
Tabel D.8.2	Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II Tahun 2025 di LRA dengan LO	81
Tabel D.9.1	Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II Tahun 2025 dan 2024	82
Tabel D.10.1	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester II Tahun 2025 dan 2024	83
Tabel D.2	Kegiatan Non Operasional Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian Tahun 2025 dan 2024	84
Tabel D.4.1	Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non lancar Semester II TA 2025	84
Tabel D.7	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025	85
Tabel D.8.1	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025	86
Tabel E.3.1.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Semester II Tahun 2025	88
Tabel E.3.2.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Semester II Tahun 2025	90
Tabel E.3.3.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Semester II Tahun 2025	92
Tabel E.3.4.1	Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Semester II Tahun 2025	94

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp537,164,549.00 atau 849.27% dari anggaran sebesar Rp63,250,000.00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp12,750,294,395.00 atau mencapai 95.31% dari alokasi anggaran sebesar Rp13,377,417,000.00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp55,531,409,917.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1,289,380,751.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp29,527,109,845.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp24,714,919,321.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp55,531,409,917.00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp515,762,449.00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp13,659,119,757.00, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar **(Rp13,143,357,308.00)**. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp8,227,100.00 dan **(Rp13,135,130,208.00)** sehingga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian pada Tahun 2025 mengalami Defisit- LO sebesar **(Rp3,135,130,208.00)**

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp56,052,702,687.00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar **(Rp13,135,130,208.00)**, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp0.00, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp12,613,837,438.00 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp55,531,409,917.00

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan BLU	B.1.1	Rp0.00	Rp0.00	0.00	Rp0.00
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.2	Rp63,250,000.00	Rp537,164,549.00	849.3	Rp265,015,103.00
Jumlah Pendapatan Negara		Rp63,250,000.00	Rp537,164,549.00	849.3	Rp265,015,103.00
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	Rp3,818,219,000.00	Rp3,755,359,535.00	98.35	Rp3,938,943,167.00
Belanja Barang	B.2.2	Rp9,519,049,000.00	Rp8,954,794,859.00	94.07	Rp9,861,558,191.00
Belanja Modal	B.2.3	Rp40,149,000.00	Rp40,140,001.00	99.98	Rp230,450,000.00
Jumlah Belanja Negara		Rp13,377,417,000.00	Rp12,750,294,395.00	95.31	Rp14,030,951,358.00

Bogor, 31 Desember 2025

Kepala Balai Besar,



Asdianto, S.P., M.T.

NIP 197801012002121006

II. NERACA

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN NERACA PER 31 Desember 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	Rp0.00	Rp0.00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	Rp0.00	Rp0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	Rp1,268,795,776.00	Rp868,088,184.00
Kas pada BLU	C.4	Rp0.00	Rp0.00
Investasi Jangka Pendek - BLU	C.5	Rp0.00	Rp0.00
Belanja Dibayar Dimuka	C.6	Rp0.00	Rp0.00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.7	Rp0.00	Rp0.00
Piutang Bukan Pajak	C.8	Rp36,430,353.00	Rp33,380,000.00
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.9	Rp0.00	Rp0.00
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.10	Rp0.00	Rp0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.11	(Rp101,025.00)	(Rp166,900.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas		Rp0.00	Rp0.00
Persediaan	C.12	Rp481,000.00	Rp2,645,850.00
Jumlah Aset Lancar		Rp1,305,506,104.00	Rp903,947,134.00
Aset Tetap			
Tanah	C.13	Rp13,152,236,000.00	Rp13,152,236,000.00
Peralatan dan Mesin	C.14	Rp22,363,648,160.00	Rp22,323,508,159.00
Gedung dan Bangunan	C.15	Rp19,912,199,153.00	Rp19,912,199,153.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.16	Rp958,580,000.00	Rp958,580,000.00
Aset Tetap Lainnya	C.17	Rp434,112,500.00	Rp434,112,500.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.18	Rp0.00	Rp0.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(Rp27,293,665,968.00)	(Rp26,346,873,514.00)
Jumlah Aset Tetap		Rp29,527,109,845.00	Rp30,433,762,298.00
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.20	Rp0.00	Rp0.00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.21	Rp0.00	Rp0.00

JUMLAH PROPERTI INVESTASI		Rp0.00	Rp0.00
Piutang Jangka Panjang			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.22	Rp0.00	Rp0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR	C.23	Rp0.00	Rp0.00
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.24	Rp0.00	Rp0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.25	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		Rp0.00	Rp0.00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.26	Rp27,731,174,093.00	Rp27,731,174,093.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.27		
Aset Lain-lain	C.28		
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	C.29	(Rp3,016,254,772).00	(Rp3,016,180,838.00)
Jumlah Aset Lainnya		Rp24,714,919,321.00	Rp24,714,993,255.00
Jumlah Aset		Rp55,547,635,270.00	Rp56,052,702,687.00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.30	Rp0.00	Rp0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan		Rp0.00	Rp0.00
Hibah Yang Belum Disahkan	C.31	Rp0.00	Rp0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.32	Rp0.00	Rp0.00
Uang Muka dari KPPN	C.33	Rp0.00	Rp0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.34	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		Rp0.00	Rp0.00
Jumlah Kewajiban		Rp0.00	Rp0.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.35	Rp55,547,635,270.00	Rp56,052,702,687.00
Jumlah Ekuitas		Rp55,547,635,270.00	Rp56,052,702,687.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		Rp55,547,635,270.00	Rp56,052,702,687.00

Bogor, 31 Desember 2025

Kepala Balai Besar,



Asdianto, S.P., M.T.

NIP 197801012002121006

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2025

(dalam Rupiah)

uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Kegiatan Operasional					
Pendapatan Operasional					
Pendapatan BLU	D.1	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2	Rp515,762,449.00	Rp 240,508,332.00	Rp275,254,117.00	114.447
Jumlah Pendapatan		Rp515,762,449.00	Rp240,508,332.00	Rp275,254,117.00	114.447
Beban Operasional					
Beban Pegawai	D.3	Rp3,754,517,885.00	Rp3,938,943,167.00	(Rp183,583,632.00)	(4.661)
Beban Persediaan	D.4	Rp346,658,726.00	Rp353,925,750.00	(Rp7,267,024.00)	(2.053)
Beban Barang dan Jasa	D.5	Rp4,297,518,451.00	Rp4,790,194,285.00	(Rp492,675,834.00)	(10.285)
Beban Pemeliharaan	D.6	Rp2,566,402,304.00	Rp2,493,045,539.00	73,356,765	2.942
Beban Perjalanan Dinas	D.7	Rp1,730,996,525.00	Rp2,229,398,067.00	(Rp483,017,839.00)	(21.666)
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	Rp946,866,388.00	Rp1,156,991,247.00	(Rp210,124,859.00)	(18.161)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(Rp65,875.00)	Rp166,900.00	(Rp232,775.00)	(139.47)
Jumlah Beban		Rp13,642,894,404.00	Rp14,962,664,955.00	(Rp1,303,545,198.00)	(8.712)
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Operasional		(Rp13,127,131,955.00)	(Rp(14,722,156,623.00))	Rp1,578,799,315.00	(10.724)
Kegiatan Non Operasional					
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	Rp5,213,000.00	Rp6,601,577.00	(Rp1,388,577.00)	(21.034)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		Rp3,014,100.00	Rp51,285,194.00	(Rp48,271,094.00)	(94.123)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	Rp3,014,100.00	Rp51,285,194.00	(Rp48,271,094.00)	(94.123)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan non Operasional		Rp8,227,100.00	Rp57,886,771.00	(Rp49,659,671.00)	(85.788)

Surplus /Defisit Sebelum Pos Luar Biasa		(Rp13,118,904,855.00)	(Rp14,664,269,852.00)	Rp1,529,139,644.00	(10.428)
Pos Luar Biasa					
Pendapatan Luar Biasa	D.15	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00
Beban Luar Biasa	D.16	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00
Jumlah Pos Luar Biasa		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	0.00
Surplus (Defisit) LO		(Rp13,118,904,855.00)	(Rp14,664,269,852.00)	Rp1,529,139,644.00	(10.428)

Bogor, 31 Desember 2025

Kepala Balai Besar,



Asdianto, S.P., M.T.

NIP 197801012002121006

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
Ekuitas Awal	E.1	Rp56,052,702,687.00	Rp55,957,124,100.00
Surplus/Defisit LO	E.2	(Rp13,118,904,855.00)	(Rp14,664,269,852.00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	E.3	Rp0.00	Rp0.00
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	Rp0.00	Rp0.00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	Rp0.00	Rp0.00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	Rp0.00	Rp125,827,000.00
Koreksi Lain-lain	E.3.4	Rp0.00	Rp0.00
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.4	Rp0.00	Rp125,827,000.00
Transaksi Antar Entitas	E.4.1	Rp12,613,837,438.00	Rp14,634,021,439.00
Ditagihkan Ke Entitas Lain	E.4.2	Rp12,750,294,395.00	Rp12,958,342,908.00
Diterima Dari Entitas Lain	E.4.3	Rp 537,164,549.00	Rp265,015,103.00
Transfer Keluar	E.4.4	Rp0.00	Rp0.00
Transfer Masuk	E.4.5	Rp0.00	Rp0.00
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.6	Rp0.00	Rp0.00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	E.4.7	Rp0.00	Rp0.00
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	E.5	Rp0.00	Rp0.00
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E.6	(Rp505,067,417.00)	Rp95,578,587.00
Ekuitas Akhir	E.6	Rp55,547,635,270.00	Rp56,052,702,687.00



Bogor, 31 Desember 2025
Kepala Balai Besar,

Asdianto, S.P., M.T.
NIP 197801012002121006

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan berdasarkan Permentan RI Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Visi dan Misi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian berdasarkan Ketetapan Presiden dan Wakil Presiden adalah:

Visi

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong".

Misi

- Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- Struktur ekonomi yang produktif, merata dan berdaya saing
- Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya
- Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perekayasa, perakitan, pengujian, penyebarluasan dan penerapan pertanian modern, serta mengkoordinasikan kegiatan perakitan dan modernisasi yang bersifat lintas sumber daya di bidang tanah (Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk), agroklimat dan hidrologi (Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian), lahan rawa (Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa) serta pencemaran lingkungan pertanian (Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian).

Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian;
- b. Pelaksanaan perekayasa dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi sumber daya lahan pertanian;
- c. Pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian;
- d. Pelaksanaan penyusunan informasi geospasial tematik dan rekomendasi perubahan iklim pertanian;
- e. Pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang sumber daya lahan pertanian;

- f. Pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian Tahun 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian termasuk didalamnya jenjang struktural dibawah Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) laporan keuangan seluruh satuan kerja lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 3 Juli 2025.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNBP-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBP-LO perizinan, Pendapatan PNBP-LO layanan, Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau

dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai
Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
- b. Beban Persediaan
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.
- c. Beban Barang dan Jasa
Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui

KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. **Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. **Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penenmaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi

meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau

- 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/atau

- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
- (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan

tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan

- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan
- 6) Penilaian kembali
- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2025, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2025 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2024

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

C. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

D. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau

- (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
- c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

E. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

F. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan

sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusun mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara

lain adalah tujuan penyisihan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.

- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 (*Unaudited*) masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca..

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan.

Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester II TA 2025 adalah sebesar Rp490,281,929.00 atau 775.15% dari anggaran sebesar Rp 63.250.00.00. Rincian anggaran dan Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester II TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNBPN Semester II TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
424	Pendapatan BLU				
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	Rp0.00	Rp0.00	0.00	Rp0.00
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	Rp0.00	Rp0.00	0.00	Rp0.00
4249	Pendapatan BLU Lainnya	Rp0.00	Rp0.00	0.00	Rp0.00
425	Pendapatan PNBPN Lainnya	Rp63,250,000.00	Rp537,164,549.00	849.27	Rp265,015,103.00
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	Rp0.00	Rp5,213,000.00	0.00	Rp0.00
425131	Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	Rp8,250,000.00	Rp0.00	0.00	Rp0.00
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	Rp0.00	Rp 1,452,000.00	100.00	Rp0.00
425432	Pendapatan Layanan Survei dan Pemetaan	Rp0.00	Rp495,698,000.00	100.00	Rp222,809,000.00
425432	Pendapatan Hasil Survei dan Pemetaan	Rp55,000,000.00	Rp2,000,000.00	0.82	Rp28,796,000.00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp0.00	Rp16,189,100.00	100.00	Rp17,890,194.00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp0.00	Rp0.00		Rp15,000.00
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budiday	Rp0.00	Rp7,864,025.00	100.00	Rp6,910,000.00
425122	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	Rp0.00	Rp0.00	0.00	Rp6,601,577.00

425131	Pendapatan sewa tanah, gedung, bangunan	Rp0.00	Rp0.00	0.00	Rp9,814,000.00
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	Rp0.00	Rp386,424.00	100.00	Rp975,332.00
Jumlah		Rp63,250,000.00	Rp537,164,549.00	849.27	Rp265,015,103.00

B.1.1. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00. Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 adalah sebesar Rp,00 atau % dari anggaran pendapatan BLU sebesar Rp.00. Realisasi pendapatan BLU Semester II TA 2025 tidak mengalami kenaikan atau penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi Pendapatan BLU Semester II TA 2025.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025

Uraian	Satker	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	BRMP SDLP	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp0.00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	BRMP SDLP	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp0.00
Pendapatan BLU Lainnya	BRMP SDLP	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp0.00
Jumlah		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan Realisasi pendapatan BLU Semester I TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi tersebut pada Semester II TA 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan Semester II TA 2024. Hal ini disebabkan karena tidak ada pendapatan BLU pada Semester II TA 2024 dan 2025.

B.1.2. PNPB Lainnya

Realisasi Pendapatan PNPB Lainnya Semester II TA 2025 adalah sebesar Rp537,164,549.00 atau 849.27% dari anggaran pendapatan PNPB Lainnya sebesar Rp63,250,000.00. Realisasi pendapatan PNPB Lainnya Semester II TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp272,149,446.00 atau 202.69% dibandingkan Semester II TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNPB Lainnya Semester II TA 2025.

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNPB Lainnya Semester II TA 2025

Kode	Uraian	Satker	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp5,213,000.00	Rp0.00	Rp5,213,000.00
425131	Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	BRMP SDLP	Rp8,250,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp1,452,000.00	Rp0.00	Rp1,452,000.00
425432	Pendapatan Layanan Survei dan Pemetaan	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp495,698,000.00	Rp222,809,000.00	Rp272,889,000.00
425432	Pendapatan Hasil Survei dan Pemetaan	BRMP SDLP	Rp55,000,000.00	Rp2,000,000.00	Rp28,796,000.00	(Rp26,796,000.00)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp16,189,100.00	Rp17,890,194.00	(Rp1,701,094.00)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp15,000.00	(Rp15,000.00)
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budiday	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp7,864,025.00	Rp6,910,000.00	Rp954,025.00
425122	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp6,601,577.00	(Rp6,601,577.00)
425131	Pendapatan sewa tanah, gedung, bangunan	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp8,362,000.00	Rp9,814,000.00	(Rp1,452,000.00)
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp386,424.00	Rp975,332.00	(Rp588,908.00)
Total			Rp63,250,000.00	Rp523,989,549.00	Rp265,015,103.00	Rp243,353,446.00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNPB Lainnya Semester II TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya untuk akhir periode 31 Desember 2025 sebesar Rp5,213,000.00 merupakan pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya. Realisasi Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN mengalami kenaikan sebesar Rp5,213,000.00 dibandingkan Semester II TA 2024. Hal tersebut disebabkan karena terdapat penjualan sisa bongkaran pemeliharaan gedung dan bangunan di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.
2. Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN untuk akhir periode 31 Desember 2025 sebesar Rp0.00.
3. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi untuk akhir periode 31 Desember 2025 sebesar Rp1,452,000.00. Realisasi Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi mengalami kenaikan dibandingkan Semester II TA 2024 sebesar Rp1,452,000.00 merupakan pendapatan yang diterima dari sewa rumah dinas milik BRMP SDLP. Hal tersebut disebabkan meningkatnya kegiatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.
4. Pendapatan Layanan Survei dan Pemetaan untuk akhir periode 31 Desember 2025 sebesar Rp495,698,000.00. Realisasi Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan

mengalami kenaikan dibandingkan Semester II TA 2024 sebesar Rp272,889,000.00. Hal tersebut disebabkan meningkatnya kegiatan layanan survei dan pemetaan di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

5. Pendapatan Hasil Survei dan Pemetaan untuk akhir periode 31 Desember 2025 sebesar Rp2,000,000.00 merupakan pendapatan yang berasal dari hasil jasa pemetaan dalam bentuk buku yang dilakukan oleh Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian atas permintaan dari masyarakat. Realisasi Pendapatan Hasil Survei dan Pemetaan mengalami penurunan dibandingkan Semester II TA 2024 sebesar Rp26,796,000.00. Hal tersebut disebabkan menurunnya permintaan dari masyarakat kepada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian untuk melakukan survey dan pemetaan lahan milik mereka.
6. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu untuk akhir periode 31 Desember 2025 sebesar Rp 16,189,100.00 merupakan total dari penerimaan kembali belanja pegawai TAYL yang terdiri dari pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan fungsional eks peneliti sebesar Rp13,175,000.00, pengembalian kelebihan pembayaran uang makan pegawai bulan desember 2024 sebesar Rp2,089,000.00. dan pengembalian belanja pegawai TAYL melalui potongan SPM No. 00003T/237242/2025 tanggal 10 Januari 2025 sebesar Rp185,000.00 dan SPM No. 00033T/237242/2025 tanggal 5 Maret 2025 sebesar Rp740,100.00. Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu mengalami penurunan sebesar Rp1,701,094.00 dibandingkan Semester II TA 2024. Hal tersebut disebabkan karena pada Semester II TA 2024 belum ada setoran kelebihan pembayaran tunjangan fungsional peneliti karena pencatatan piutang baru dilakukan di akhir Semester II TA 2024.
7. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya untuk akhir periode 31 Desember 2025 sebesar Rp7,864,025.00. Realisasi Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya mengalami kenaikan sebesar Rp954,025.00 dibandingkan Semester II TA 2024. Hal tersebut disebabkan meningkatnya hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya di lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.
8. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin untuk akhir periode 31 Desember 2025 sebesar Rp0.00. Realisasi Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin mengalami penurunan dibandingkan Semester II TA 2024 sebesar Rp6,601,577.00. Hal tersebut disebabkan tidak adanya penjualan peralatan dan mesin sampai akhir periode 31 Desember 2025.
9. Pendapatan sewa tanah, gedung, bangunan untuk akhir periode 31 Desember 2025 sebesar Rp8,362,0000.00. Realisasi Pendapatan sewa tanah, gedung, bangunan mengalami penurunan dibandingkan TA 2024 sebesar Rp1,452,000.00 merupakan pendapatan hasil sewa aset sebagian bangunan milik negara untuk ruang kantin dan ruang koperasi. Hal tersebut disebabkan tidak ada pemasukan pendapatan sewa tanah, gedung, bangunan sampai akhir periode 31 Desember 2025.
10. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) untuk akhir periode 31 Desember 2025 sebesar Rp386,424.00 merupakan bunga rekening penampungan lainnya yang perlakuan jasa gironya belum TNP (Treasury Notional Pooling) diawal pembukaan rekening hibah. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) mengalami penurunan

dibandingkan Semester II TA 2024 sebesar Rp588,908.00. Hal tersebut disebabkan berkurangnya pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)sampai akhir periode 31 Desember 2025.

Pemungutan PNBPN mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yg bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2024 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk PNBPN terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBPN yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBPN mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2024.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Semester II TA 2025 adalah sebesar Rp10,817,442,554.00 atau 80.86% dari anggaran belanja sebesar Rp13,377,417,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	Rp3,818,219,000.00	Rp3,755,359,535.00	98.35	Rp3,938,943,167.00
Belanja Barang	Rp9,519,049,000.00	Rp8,954,794,859.00	94.07	Rp9,861,558,191.00
Belanja Modal	Rp40,149,000.00	Rp40,140,001.00	99.98	Rp230,450,000.00
Jumlah	Rp13,377,417,000.00	Rp12,750,294,395.00	95.31	Rp14,030,951,358.00

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program Semester II TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp1,424,526,000.00	Rp1,414,850,672.00	99.32	Rp2,936,551,694.00
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Program Dukungan Manajemen	Rp11,952,891,000.00	Rp11,337,289,125.00	99.84	Rp11,105,426,337.00
Jumlah	Rp13,377,417,000.00	Rp0.00		Rp0.00

Realisasi belanja Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1,280,656,963.00 atau 9.12%, apabila dibandingkan Semester II TA 2024. Penurunan tersebut disebabkan antara lain :

1. Penurunan alokasi belanja pegawai sebagai dampak adanya pegawai yang memasuki masa purna tugas dan mutasi tugas.
2. Penurunan alokasi belanja barang sebagai dampak berkurangnya kegiatan teknis selama masa transisi dari BSIP ke BRMP.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3,755,359,535.00 dan Rp3,938,943,167.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturanperundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp183,583,632.00 atau 4.67% dari Semester II TA 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya pegawai yang memasuki masa purna tugas dan mutasi pegawai ke satuan kerja lain.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025 menurut klasifikasi.

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	Rp3,681,304,000.00	Rp3,628,679,647.00	98.57	Rp3,826,312,004.00
Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS				(Rp520,800.00)
(Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS)		(Rp302.00)		(Rp1,373.00)
Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS				(Rp2,025,000.00)
Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS				(Rp8,620,000.00)
(Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS)		(Rp1,845,100.00)		(Rp4,040,000.00)
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	Rp136,915,000.00	Rp128,525,290.00	93.87	Rp127,838,636.00

Belanja Lembur	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Jumlah	Rp3,818,219,000.00	Rp3,755,359,535.00	98.35	Rp3,938,943,467.00

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp8,954,794,859.00 dan Rp9,861,558,191.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang Semester II TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	Rp2,971,808,000.00	Rp2,903,437,719.00	97.69	Rp2,881,711,338.00
Belanja Barang Non Operasional	Rp443,726,000.00	Rp437,115,950.00	98.51	Rp1,147,918,300.00
Belanja Kontribusi dan Kompensasi				
Belanja Barang Persediaan	Rp351,180,000.00	Rp348,975,846.00	99.37	Rp389,713,300.00
Belanja Jasa				
Belanja Jasa	Rp997,362,000.00	Rp956,964,782.00	95.94	Rp1,244,272,297.00
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Pemeliharaan	Rp2,563,192,000.00	Rp2,561,920,334.00	99.95	Rp2,452,252,539.00
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Perjalanan DN	Rp2,191,781,000.00	Rp1,746,380,228.00	79.67	Rp1,745,690,417.00
Belanja Perjalanan LN		Rp0.00	0.00	
Belanja BLU				
Belanja Barang BLU	Rp0.00	Rp0.00	0.00	Rp0.00
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda				
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	Rp0.00	Rp0.00	0.00	Rp0.00
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	Rp0.00	Rp0.00	0.00	Rp0.00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	Rp0.00	Rp0.00	0.00	Rp0.00

Jumlah	Rp9,519,049,000.00	Rp8,954,794,859.00	94.07	Rp9,861,558,191.00
--------	--------------------	--------------------	-------	--------------------

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp348,975,846.00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Barang Non Operasional	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Barang Persediaan				
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp351,180,000.00	Rp348,975,846.00	99.37	Rp389,713,300.00
Belanja Barang Persediaan bahan baku	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Barang Persediaan Lainnya	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja BLU				
Belanja Barang BLU				

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat – BLU	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi – BLU	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Barang Persediaan Lainnya – BLU	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Jumlah	Rp351,180,000.00	Rp348,975,846.00	99.37	Rp389,713,300.00

Realisasi belanja barang Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp40,737,454.00 atau 10.46% dibandingkan Semester II TA 2024. Hal ini disebabkan karena berkurangnya kegiatan teknis selama masa transisi dari BSIP ke BRMP

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp40,140,001.00 dan Rp230,450,000.00. Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp190,309,999.00 atau 17.41% dibandingkan periode Semester II TA 2024. Hal tersebut disebabkan karena nilai pagu anggaran belanja modal tahun 2025 lebih kecil dibandingkan pagu tahun 2024.

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp40,149,000.00	Rp40,140,001.00	99.98	Rp230,450,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Modal Lainnya	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Modal BLU	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Jumlah	Rp40,149,000.00	Rp40,140,001.00	99.98	Rp230,450,000.00

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp,00. Realisasi Belanja Modal Tanah Semester II TA 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan Semester II TA 2024. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya anggaran belanja modal tanah untuk Semester II TA 2024 dan TA 2025.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp40,140,001.00 dan Rp230,450,000.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami penurunan dibandingkan Semester II TA 2024.

Tabel B.2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp40,149,000.00	Rp40,140,001.00	99.98	Rp230,450,000.00
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Jumlah	Rp40,149,000.00	Rp40,140,001.00	99.98	Rp230,450,000.00

Dari nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp40,140,001.00 dan Rp230,450,000.00 menambah saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan Semester II TA 2024. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya anggaran belanja modal gedung dan bangunan untuk Semester II Tahun 2025.

Tabel B.2.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Jumlah	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00

a. Dari nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00 tidak menambah saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Semester II TA 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan Semester II TA 2024.

Tabel B.2.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Modal Irigasi	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Modal Jaringan	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Jumlah	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00

5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan Semester II TA 2024.

Tabel B.2.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Jumlah	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00

6. Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Realisasi Belanja Modal BLU Semester II TA 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan Semester II TA 2024.

Tabel B.2.3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00
Jumlah	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00

A PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp56,294,230,020.00 dan Rp Rp56,052,702,687.00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp241,527,333.00 atau 0.43%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	Rp1,289,380,751.00	Rp903,947,134.00
Aset Tetap	Rp29,527,109,845.00	Rp30,433,762,298.00
Properti Investasi	Rp0.00	Rp0.00
Piutang Jangka Panjang	Rp0.00	Rp0.00
Aset Lainnya	Rp24,714,919,321.00	Rp24,714,993,255.00
Jumlah	Rp55,531,409,917.00	Rp56,052,702,687.00

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1,289,380,751.00 dan Rp903,947,134.00 . Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp385,433,617.00 atau 42.64%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp0.00	Rp0.00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp0.00	Rp0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	Rp 1,268,795,776.00	Rp868,088,184.00
Kas pada BLU	Rp0.00	Rp0.00
Investasi Jangka Pendek – BLU	Rp0.00	Rp0.00
Belanja Dibayar Dimuka	Rp0.00	Rp0.00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	Rp0.00	Rp0.00
Piutang Bukan Pajak	Rp36,430,353.00	Rp33,380,000.00
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	Rp0.00	Rp0.00
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	Rp0.00	Rp0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(Rp101,025.00)	(Rp166,900.00)
Persediaan	Rp 481,000.00	Rp2,645,850.00
Jumlah	Rp1,305,606,104.00	Rp903,947,134.00

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024.

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi

Sumber Daya Lahan Pertanian tidak memiliki rekening untuk menampung pendapatan yang berasal dari PNBPN. Setiap dana PNBPN yang masuk akan langsung masuk ke kas negara melalui billing penerimaan negara. Bendara penerimaan hanya membuat kode billing setoran dan membukukan setiap transaksi penerimaan.

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1,268,795,776.00 dan Rp868,088,184.00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp400,707,592.00 atau 46.16%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3.1 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Kas Lainnya dari Hibah	Rp1,268,795,776.00	Rp868,088,184.00	Rp400,707,592.00
Kas Lainnya di BLU	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Total	Rp1,268,795,776.00	Rp868,088,184.00	Rp400,707,592.00

Saldo kas lainnya dan setara kas tersebut merupakan dana Hibah dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan National Soil Information Systems to Support The Transformation of Agrifood Systems in AFACI Countries sebesar Rp344,867,494.00 yang terdaftar dengan nomor register 2227WN8A dan ditampung pada rekening hibah langsung dengan nama dan nomor yaitu RPL 140 PDHL BBSDL P UNTUK 2227WN8A (AFACI)/0012-01-004790-30-3. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dengan Asian Food And Agriculture Cooperation Initiative (AFACI). Kegiatan kedua adalah Crop Health and Nutrient Management of Shallot-Chilli-Rice Cropping System In Coastal Indonesia dengan nominal sebesar Rp364,990,316.00 yang merupakan kegiatan kerja sama antara Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dengan Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR). Kegiatan hibah tersebut terdaftar dengan nomor register 2W2H8PDA dan ditampung pada rekening hibah langsung dengan nama dan nomor yaitu RPL 140 PDHL BBSDL P UNTUK 2W2H8PDA (ACIAR)/0012-01-004016-30-1. Kegiatan ketiga adalah Indonesia Testbed Project dengan nominal sebesar Rp558.937.966 yang merupakan kegiatan kerja sama antara Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dengan Korean Agriculture Technology

Promotion Agency (KOAT). Kegiatan hibah tersebut terdaftar dengan nomor register 2JL7VCNA dan ditampung pada rekening hibah langsung dengan nama dan nomor yaitu RPL 140 PDHL BBSDLP UNTUK 2JL7VCNA (KOAT)/0012-01-004887-30-4. Selain dari dana hibah, saldo kas lainnya dan setara kas tersebut merupakan saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran.

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024.

2. Kas Lainnya dari Hibah

- a. Saldo Kas Lainnya dari Hibah per 31 Desember 2025 sebesar Rp1,268,795,776.00 merupakan saldo kas hibah langsung yang telah diterima dari 3 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan National Soil Information Systems to Support The Transformation of Agrifood Systems in AFACI Countries sebesar Rp344,867,494.00 yang terdaftar dengan nomor register 2227WN8A dan ditampung pada rekening hibah langsung dengan nama dan nomor yaitu RPL 140 PDHL BBSDLP UNTUK 2227WN8A (AFACI)/0012-01-004790-30-3. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dengan Asian Food And Agriculture Cooperation Initiative (AFACI).
 - 2) Kegiatan Crop Health and Nutrient Management of Shallot-Chilli-Rice Cropping System In Coastal Indonesia dengan nominal sebesar Rp364,990,316.00 yang merupakan kegiatan kerja sama antara Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dengan Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR). Kegiatan hibah tersebut terdaftar dengan nomor register 2W2H8PDA dan ditampung pada rekening hibah langsung dengan nama dan nomor yaitu RPL 140 PDHL BBSDLP UNTUK 2W2H8PDA (ACIAR)/0012-01-004016-30-1.
 - 3) Kegiatan ketiga adalah Indonesia Testbed Project dengan nominal sebesar Rp558.937.966 yang merupakan kegiatan kerja sama antara Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dengan Korean Agriculture Technology Promotion Agency (KOAT). Kegiatan hibah tersebut terdaftar dengan nomor register 2JL7VCNA dan ditampung pada rekening hibah langsung dengan nama dan nomor yaitu RPL 140 PDHL BBSDLP UNTUK 2JL7VCNA (KOAT)/0012-01-004887-30-4

3. Kas Lainnya di BLU

Saldo Kas Lainnya di BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas Lainnya di BLU per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya di BLU per 31 Desember 2024.

C.4. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Kas pada BLU adalah saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.4.1. Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2025 dan 2024

Satker	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan) Rp
BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

Rincian mutasi tambah dan kurang saldo Kas pada BLU adalah sebagai berikut.

Tabel C.4.2. Mutasi Tambah dan Kurang Kas pada BLU

Uraian	BRMP SDLP
Saldo 31 Desember 2024	Rp0.00
Mutasi Tambah	
Pendapatan	Rp0.00
Reklas dari Dana Deposito	Rp0.00
Mutasi Kurang	
Belanja Barang BLU	Rp0.00
Belanja Modal BLU	Rp0.00
Reklas ke Investasi Jangka Pendek BLU	Rp0.00
Saldo 31 Desember 2025	Rp0.00

C.5. INVESTASI JANGKA PENDEK – BLU

Investasi Jangka Pendek – BLU adalah investasi pada satker BLU yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2024. Rincian saldo Investasi Jangka Pendek – BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.5.1. Saldo Investasi Jangka Pendek - BLU
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

C.6. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6.1 Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Tabel C.0.1 Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024						
No	Jenis Belanja	Uraian	Satker	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pegawai	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
	Jumlah			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
2	Belanja Barang	Belanja Barang Operasional	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		Belanja Perjalanan Dinas	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		Belanja Barang Non Operasional	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
	Jumlah			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Total				Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

1. Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai

Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.00 merupakan selisih perhitungan tunjangan kinerja bulan Desember 2025 yang

telah dibayarkan penuh di Desember 2025 dengan perhitungan sesuai presensi pegawai bulan Desember 2025.

Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel C.6.2 Perhitungan Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 Seharusnya

Satker	Jumlah Pegawai	Nilai Pembayaran Full (Rp)	Nilai Seharusnya Dibayar (Rp)	Selisih (Rp)	Nilai Pengembalian di Tahun 2025
BRMP SDLP	0	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah	0	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

2. Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang

Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang per 31 Desember 2025 Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Belanja Dibayar Dimuka – Belanja Barang per 31 Desember 2024.

C.7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7.1 Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Pendapatan	Satker	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
2	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

C.8. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp20,205,000.00 dan Rp33,380,000.00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp13,175,000.00 atau 39.47% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut

Tabel C.8.1. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian	Satker	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	BRMP SDLP		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	BRMP SDLP		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
4253	Pendapatan Kesehatan. Perlindungan Sosial. Dan Keagamaan	BRMP SDLP		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	BRMP SDLP		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	BRMP SDLP		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
4258	Pendapatan Denda	BRMP SDLP		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
4259	Pendapatan Lain-Lain	BRMP SDLP	2025	Rp36,430,353.00	Rp33,380,000.00	(Rp3,050,353.00)
Jumlah				Rp36,430,353.00	Rp33,380,000.00	(Rp3,050,353.00)

C.9. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Rincian saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.9.1. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan	0	0	0
2	Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.10. PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU.

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.10.1. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

C.11. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp101,025.00 dan Rp166,900.00. Saldo Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.11.1 Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Jenis Piutang	Satker	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	BRMP SDLP	Rp101,025.00	Rp166,900.00	Rp65,875.00
2	Bagian Lancar TP	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
3	Bagian Lancar TGR	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
4	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah			Rp101,025.00	Rp166,900.00	Rp65,875.00

C.12. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp481,000.00 dan Rp2,645,850.00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2,164,850.00 atau 81.82% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.12.1 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian Persediaan	Satker	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Barang Konsumsi	BRMP SDLP	Rp481,000.00	Rp2,645,850.00	Rp285,051,576.00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp4,481,970.00
3	Suku Cadang	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

8	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
9	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
10	Bahan Baku	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp4,205,500.00
11	Persediaan Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Total			Rp481,000.00	Rp2,645,850.00	(Rp2,164,850.00)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp29,994,036,585.00 dan Rp30,433,762,298.00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp439,725,713.00 atau 1.44% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	Rp13,152,236,000.00	Rp13,152,236,000.00	Rp0.00
2	Peralatan dan Mesin	Rp22,363,648,160.00	Rp22,323,508,159.00	Rp40,140,001.00
3	Gedung dan Bangunan	Rp19,912,199,153.00	Rp19,912,199,153.00	Rp0.00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp958,580,000.00	Rp958,580,000.00	Rp0.00
5	Aset Tetap Lainnya	Rp434,112,500.00	Rp434,112,500.00	Rp0.00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
8	Akumulasi Penyusutan	(Rp27,293,665,968.00)	(Rp26,346,873,514.00)	Rp479,865,714.00
Jumlah		Rp29,527,109,845.00	Rp30,433,762,298.00	Rp439,725,713.00

C 13. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp13,152,236,000.00 dan Rp13,152,236,000.00 . Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan sebesar apabila dibandingkan

dengan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024. Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C13.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2024	Rp13,152,236,000.00
B	Mutasi Tambah	Rp0.00
1	Transfer Masuk	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
2	Pembelian	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
5	Reklasifikasi Masuk	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
6	Perolehan Lainnya	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
7	Saldo Awal	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
8	Hibah Masuk	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
9	Pengembangan Melalui KDP	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
12	Koreksi Susulan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
C	Mutasi Kurang	Rp0.00

1	Transfer Keluar	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
2	Koreksi Pencatatan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
3	Hibah Keluar	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
4	Reklasifikasi Keluar	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
7	Penghapusan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
D	Saldo Tanah 31 Desember 2025	Rp13,152,236,000.00

C.13. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp22,363,648,160.00 dan Rp22,323,508,159.00 Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp40,140,001.00 atau 0.18% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.2 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2024	Rp22,323,508,159.00
B	Mutasi Tambah	Rp0.00
1	Transfer Masuk	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
2	Pembelian	Rp40,140,001.00
	BRMP SDLP	Rp0.00

3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
5	Reklasifikasi Masuk	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
6	Perolehan Lainnya	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
7	Saldo Awal	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
8	Hibah Masuk	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
9	Pengembangan Melalui KDP	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
12	Koreksi Susulan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
C	Mutasi Kurang	Rp0.00
1	Transfer Keluar	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
2	Koreksi Pencatatan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
3	Hibah Keluar	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
4	Reklasifikasi Keluar	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00

5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
7	Penghapusan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
D	Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2025	Rp22,363,648,160.00

C.13. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp19,912,199,153.00 dan Rp19,912,199,153.00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.3 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2024	Rp19,912,199,153.00
B	Mutasi Tambah	Rp0.00
1	Transfer Masuk	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
2	Pembelian	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
5	Reklasifikasi Masuk	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
6	Perolehan Lainnya	Rp0.00

	BRMP SDLP	Rp0.00
7	Saldo Awal	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
9	Hibah Masuk	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
10	Pengembangan Melalui KDP	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
12	Koreksi Susulan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
C	Mutasi Kurang	Rp0.00
1	Transfer Keluar	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
2	Koreksi Pencatatan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
3	Hibah Keluar	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
4	Reklasifikasi Keluar	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
7	Penghapusan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00

8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
9	Perubahan BMN Ke PI	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
D	Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2025	Rp19,912,199,153.00

C.13. Jalan. Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp958,580,000.00 dan Rp958,580,000.00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan sebesar apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.13.4 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2024	Rp958,580,000.00
B	Mutasi Tambah	Rp0.00
1	Transfer Masuk	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
2	Pembelian	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
5	Reklasifikasi Masuk	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
6	Perolehan Lainnya	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
7	Saldo Awal	Rp0.00

	BRMP SDLP	Rp0.00
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
9	Pengembangan Melalui KDP	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
10	Koreksi Susulan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
C	Total Mutasi Kurang	Rp0.00
1	Transfer Keluar	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
2	Koreksi Pencatatan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
3	Hibah Keluar	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
4	Reklasifikasi Keluar	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
7	Penghapusan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2025	Rp958,580,000.00

C.14. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp434,112,500.00 dan Rp434,112,500.00. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2024	Rp434,112,500.00
B	Mutasi Tambah	Rp0.00
1	Transfer Masuk	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
2	Pembelian	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
5	Reklasifikasi Masuk	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
6	Saldo Awal	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
7	Koreksi Susulan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
C	Mutasi Kurang	Rp0.00
1	Transfer Keluar	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
2	Koreksi Pencatatan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
3	Hibah Keluar	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
4	Reklasifikasi Keluar	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00

7	Penghapusan	Rp0.00
	BRMP SDLP	Rp0.00
D	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025	Rp434,112,500.00

C.15. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2024	Rp0.00
B	Mutasi Tambah	Rp0.00
1	Perolehan/Penambahan KDP	Rp0.00
2	Pengembangan KDP	Rp0.00
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	Rp0.00
4	Reklasifikasi Masuk KDP	Rp0.00
5	Perolehan Lainnya KDP	Rp0.00
6	Saldo Awal KDP	Rp0.00
C	Mutasi Kurang	Rp0.00
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp0.00
2	Pengembangan Melalui KDP	Rp0.00
3	Koreksi Pencatatan KDP	Rp0.00
4	Penghapusan/Penghentian KDP	Rp0.00
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	Rp0.00
6	Reklasifikasi Keluar KDP	Rp0.00
7	Transfer Keluar KDP	Rp0.00
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2025	Rp0.00

C.16. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp27,293,665,968.00 dan Rp26,346,873,514.00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp946,792,454.00 atau 3.59% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.16.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	Rp21,646,802,440.00	Rp21,217,639,361.00	Rp429,163,079.00
2	Gedung dan Bangunan	Rp4,714,055,782.00	Rp4,197,437,083.00	Rp516,618,699.00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp932,807,746.00	Rp931,797,070.00	Rp1,010,676.00
4	Aset Tetap Lainnya	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah		Rp27,293,665,968.00	Rp26,346,873,514.00	Rp946,792,454.00

C.17. PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.17.1. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024. Rincian saldo Properti Investasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17.1 Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

C.18 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Akumulasi Penyusutan

Properti Investasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024. Rincian saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.18.1 Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

C.19. PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.19.1 Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Tagihan TP/TGR	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
3	Piutang Jangka Panjang Lainnya	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

C.20. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian

negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.20.1 Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Satker	Tahun Penetapan Dokumen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
BRMP SDLP	2024	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Total		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

C.21. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada table berikut.

Tabel C.23.1 Saldo Tagihan TP/TG per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Satker	Tahun Penetapan Dokumen	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
BRMP SDLP	2024	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Total		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

C.22. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024.

C.23. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per

31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024.

C.24. ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp24,714,919,321.00 dan Rp24,714,993,255.00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami perubahan penurunan sebesar Rp73,934.00 apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.24.1 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	Rp27,731,174,093.00	Rp27,731,174,093.00	Rp0.00
2	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
3	Aset Lain-lain	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	Rp3,016,254,772.00	Rp3,016,180,838.00	(Rp36,967.00)
Jumlah		Rp24,714,919,321.00	Rp24,714,993,255.00	(Rp36,967.00)

C.25. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp27,731,174,093.00 dan Rp27,731,174,093.00. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan sebesar apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.25.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB 31 Desember 2024	Rp27,731,174,093.00
1	Saldo Awal	Rp27,731,174,093.00
B	Mutasi Tambah	Rp0.00
2	Pembelian	Rp0.00

3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp0.00
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp0.00
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp0.00
6	Perolehan Lainnya	Rp0.00
C	Mutasi Kurang	Rp0.00
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp0.00
8	Transfer Keluar	Rp0.00
D	Saldo ATB 31 Desember 2025	Rp27,731,174,093.00

Rincian saldo Aset Tak Berwujud pada tabel berikut.

Tabel C.25.2 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	Saker	31 Desember2025	31 Desember2024	Kenaikan (Penurunan)
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Hak Cipta	BRMP SDLP	Rp5,175,000.00	Rp5,175,000.00	Rp0.00
2	Paten	BRMP SDLP			Rp0.00
3	Software	BRMP SDLP	Rp3,012,687,229.00	Rp3,012,687,229.00	Rp0.00
4	Lisensi	BRMP SDLP			Rp0.00
5	Hasil Kajian/Penelitian	BRMP SDLP	Rp24,710,591,864.00	Rp24,710,591,864.00	Rp0.00
6	Peta RBI Skala Menengah	BRMP SDLP	Rp2,720,000.00	Rp2,720,000.00	Rp0.00
Jumlah			Rp27,731,174,093.00	Rp27,731,174,093.00	Rp0.00

C.26. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.26.1 Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Satker	Jumlah Paket Pekerjaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
BRMP SDLP	0	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah	0	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

C.27. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.27.1 Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Klasifikasi	Satker	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap yang dihentikan Penggunaannya	Tanah	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00
		Peralatan dan Mesin	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00
		Gedung dan Bangunan	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00
		Jalan Irigasi Jaringan	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00
		Aset Tetap Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00
2	ATB yang Dihentikan Penggunaannya	Aset Tak Berwujud	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00
3	Belanja 526 Belum Didukung Bukti Pertanggungjawaban		BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00
Total			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

C.28. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3,016,254,772.00 dan Rp 3,016,180,838.00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp73,934.00 apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.28.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Tabel C.20.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB					
No.	Uraian		31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	ATB	Hak Cipta	Rp847,543.00	Rp773,609.00	Rp73,934.00
		Paten			Rp0.00
		Software	Rp3,012,687,229.00	Rp3,012,687,229.00	Rp0.00
		Lisensi			Rp0.00
		Hasil Kajian/Penelitian	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		ATB Lainnya	Rp2,720,000.00	Rp2,720,000.00	Rp0.00
	Jumlah		Rp3,016,254,772.00	Rp3,016,180,838.00	Rp73,934.00
2	Aset Lain-Lain	Tanah	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		Peralatan & Mesin	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		Gedung dan Bangunan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		Aset Tetap Lainnya	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		Aset Tak Berwujud	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
	Jumlah		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Total			Rp3,016,254,772.00	Rp3,016,180,838.00	Rp73,934.00

C.29. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

C.29.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan karena pada periode 31 Desember 2025 tidak terdapat saldo kewajiban jangka pendek. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.29.1 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	Rp0.00	Rp0.00	Rp355,513,532.00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
3	Uang Muka Dari KPPN	Rp0.00	Rp0.00	Rp66,000,000.00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp0.00	Rp0.00	Rp261,631,727.00
Jumlah		Rp0.00	Rp0.00	Rp683,145,259.00

C.30. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan karena pada periode 31 Desember 2025 tidak terdapat saldo utang kepada pihak ketiga. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.30.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Lampiran 2: Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024					
No	Uraian		31 Desember2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	Rp0.00		Rp0.00
	Jumlah		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		Belanja Jasa	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
	Jumlah		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
	Jumlah		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Belanja Barang	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
	Jumlah		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
	Jumlah		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Total			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

C.31. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.31.1 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis PNB	Satker	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
2	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Total			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

C.32. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024. Hal tersebut disebabkan karena pada periode 31 Desember 2025 tidak terdapat saldo uang muka dari KPPN.

C.33. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00 merupakan saldo yang berasal dari hibah yang belum disahkan. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025.

C.34. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp55,531,409,917.00 dan Rp56,052,702,687.00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp521,292,770.00 atau 0.93% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian Semester II TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	Semester I TA 2025 (Rp)	Semester I TA 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	Rp515,762,449.00	Rp240,508,332.00
Beban Operasional	Rp13,659,119,757.00	Rp14,962,664,955.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(Rp13,143,357,308.00)	(Rp14,722,156,623.00)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp515,762,449.00 dan Rp240,508,332.00. Nilai Pendapatan Operasional Semester II TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp275,254,117.00 atau 114.447% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Semester II TA 2024.

D.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik, yang dapat berasal dari pembayaran oleh pengguna layanan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan BLU Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp0.00. Nilai Pendapatan BLU Semester II TA 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan BLU Semester II TA 2024. Rincian nilai Pendapatan BLU Semester II TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.1 Pendapatan BLU Semester II TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Satker	Semester II TA 2025 (Rp)	Semester II TA 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Pendapatan BLU Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

Perbandingan realisasi Pendapatan BLU di LRA dengan nilai Pendapatan BLU di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.2 Perbandingan Pendapatan BLU Semester II TA 2025 di LRA dengan LO

Uraian	Satker	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Pendapatan BLU Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp515,762,449.00 dan Rp240,508,332.00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Semester II TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp275,254,117.00 atau 114.447% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Semester II TA 2024.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Semester II TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp537,164,549.00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Semester II TA 2025 di LO disajikan sebesar Rp515,762,449.00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp21,402,100.00. Selisih tersebut merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp16,189,100.00 dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp5,213,000.00 yang tidak tercantum di LO.

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp13,659,119,757.00 dan Rp14,962,664,955.00. Nilai Beban Operasional Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1,303,545,198.00 atau 8.712% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Semester II TA 2024.

D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3,755,359,535.00 dan Rp3,938,943,167.00. Nilai Beban Pegawai Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp183,583,632.00 atau 4.661% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Semester II TA 2024. Rincian Beban Pegawai Semester II TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai Semester II TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Semester II TA 2025 (Rp)	Semester II TA 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	Rp3,626,834,245.00	Rp3,811,104,531.00	(Rp184,270,286.00)
Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	Rp128,525,290.00	Rp127,838,636.00	Rp686,654.00
Beban Lembur	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah	Rp3,755,359,535.00	Rp3,938,943,167.00	(Rp183,583,632.00)

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Semester II TA 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	Rp3,628,679,647.00	Rp3,626,834,245.00	Rp1,845,402.00
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara			Rp0.00
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS			Rp0.00
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	Rp128,525,290.00	Rp128,525,290.00	Rp0.00
Belanja/Beban Lembur			Rp0.00

Belanja/Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito			Rp0.00
Jumlah	Rp3,757,204,937.00	Rp3,755,359,535.00	Rp1,845,402.00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp1,845,402.00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp302.00
2	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp1,1845,100.00
Jumlah		Rp1,845,402.00

D.4. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp346,658,726.00 dan Rp353,925,750.00 merupakan beban persediaan konsumsi. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7,267,024.00 atau 2.053% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan Semester II TA 2025 dan TA2024 disajikan pada tabel berikut

Tabel D.4.1 Beban Persediaan Semester II TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Semester II TA 2025 (Rp)	Semester II TA 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			Rp0.00
Beban Barang Operasional			Rp0.00
Beban Barang Non Operasional			Rp0.00
Beban Kontribusi dan Kompensasi			Rp0.00
Beban Barang Persediaan	Rp346,658,726.00	Rp353,925,750.00	(Rp7,267,024.00)
Beban Pemeliharaan			Rp0.00
Beban BLU			Rp0.00
Beban Barang BLU			Rp0.00
Jumlah	Rp346,658,726.00	Rp353,925,750.00	(Rp7,267,024.00)

*) Nilai Beban Barang termasuk alokasi Beban Barang yang menghasilkan Persediaan BLU

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Semester II TA 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Belanja/Beban Barang Non Operasional	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Belanja/Beban Barang Persediaan	Rp348,975,846.00	Rp346,658,726.00	Rp2,317,120.00
Belanja/Beban Pemeliharaan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah	348,975,846	Rp346,658,726.00	Rp2,317,120.00

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp Rp2,317,120.00. Selisih tersebut disebabkan karena terdapat saldo awal persediaan yang merupakan sisa saldo tahun sebelumnya sebesar Rp2,645,850.00, beban persediaan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp4,481,970.00 serta sisa saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp481,000.00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan (Bahan persediaan untuk pemeliharaan)	Rp4,481,970.00
Saldo awal	Rp2,645,850.00
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses	
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	
Koreksi Nilai Persediaan	
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	
Beban Kerugian Pelepasan Aset	
Beban Persediaan Rusak/Usang	
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	
Jumlah	Rp1,836,120.00

D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp4,297,518,451.00 dan Rp4,790,194,285.00. Nilai Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp492,675,834.00 atau 10.285% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2025 dan TA2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Semester II TA 2025 (Rp)	Semester II TA 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	Rp2,903,437,719.00	Rp2,881,711,338.00	Rp21,726,381.00
Beban Barang Non Operasional	Rp437,115,950.00	Rp664,210,650.00	(Rp227,094,700.00)
Beban Kontribusi dan Kompensasi	Rp0.00		Rp0.00
Beban Jasa			
Beban Jasa	Rp956,964,782.00	Rp1,244,272,297.00	(Rp287,307,515.00)
Beban BLU			
Beban Barang BLU	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah	Rp4,297,518,451.00	Rp4,790,194,285.00	(Rp492,675,834.00)

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	Rp2,903,437,719.00	Rp2,903,437,719.00	Rp0.00
Belanja/Beban Barang Non Operasional	Rp437,115,950.00	Rp437,115,950.00	Rp0.00
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	Rp956,964,782.00	Rp956,964,782.00	Rp0.00
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah	Rp4,297,518,451.00	Rp4,297,518,451.00	Rp0.00

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO.

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau

memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2,566,402,304.00 dan Rp2,493,045,539.00. Nilai Beban Pemeliharaan Semester II TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp73,356,765.00 atau 2.942% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Semester II TA 2024. Rincian Beban Pemeliharaan Semester II TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.6.1 Belanja/Beban Pemeliharaan Semester II TA 2024 dan TA 2025

Uraian	Semester II TA 2025	Semester II TA 2024	Kenaikan (Penurunan) %
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp1,597,416,439.00	Rp1,491,293,577.00	7.11
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp964,503,895.00	Rp859,961,862.00	12.15
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp0.00	Rp0.00	0.00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	Rp4,481,970.00	Rp0.00	0.00
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Pemeliharaan BLU	Rp0.00	Rp0.00	0.00
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel			
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	Rp0.00	Rp0.00	0.00
Jumlah	Rp2,566,402,304.00	Rp2,493,045,539.00	2.942

Perbandingan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA dengan nilai Beban Pemeliharaan di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.6.2 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Semester II TA 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp1,597,416,439.00	Rp1,597,416,439.00	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp964,503,895.00	Rp964,503,895.00	0.00
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp0.00	Rp0.00	0.00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	Rp0.00	Rp4,481,970.00	(Rp4,481,970.00)
Belanja/Beban BLU			0.00
Belanja/Beban Pemeliharaan BLU	Rp0.00	Rp0.00	0.00
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel			0.00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	Rp0.00	Rp0.00	0.00

Jumlah	Rp2,561,920,334.00	Rp2,566,402,304.00	(Rp4,481,970.00)
---------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp2,561,920,334.00, nilai Beban Pemeliharaan di LRA dan LO terdapat selisih sebesar Rp4,481,970.00 yang merupakan beban persediaan untuk bahan pemeliharaan.

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nilai Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1,746,380,228.00 dan Rp2,229,398,067.00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp193,664,259.00 atau 37.621% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2024. Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.7.1. Belanja/Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2024 dan 2025

Uraian	Semester II TA 2025	Semester II TA 2024	Kenaikan (Penurunan) %
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1,725,280,228.00	Rp1,870,134,567.00	7,75
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp21,100,000.00	Rp0.00	0.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp0.00	Rp57,900,000.00	0.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp0.00	Rp242,453,500.00	0.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	Rp0.00	Rp 58,910,000.00	0.00
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	Rp0.00	Rp0.00	0.00
Belanja Perjalanan	Rp0.00	Rp0.00	0.00
Jumlah	Rp1,746,380,228.00	Rp2,229,398,067.00	(37.621)

Perbandingan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA dengan nilai Beban Pemeliharaan di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.7.2 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Semester I 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1,725,280,228.00	Rp1,725,280,228.00	Rp0.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp21,100,000.00	Rp21,100,000.00	Rp0.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Belanja Perjalanan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah	Rp1,746,380,228.00	Rp1,746,380,228.00	Rp0.00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp0.00, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO tidak terdapat perbedaan.

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II TA 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II TA 2024. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II TA 2025 dan 2024

Uraian	Semester II TA 2025 (Rp)	Semester II TA 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II TA 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Belanja/Beban Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp946,866,388.00 dan Rp1,156,991,247.00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp210,124,859.00 atau 18.161% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2025 dan 2024

No.	Uraian		Semester II 2025 (Rp)	Semester II TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	Rp 429,163,079.00	Rp479,192,738.00	(Rp50,029,659.00)
		Gedung dan Bangunan	Rp516,618,699.00	Rp553,484,966.00	(Rp36,866,267.00)
		Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp1,010,676.00	Rp124,239,609.00	(Rp123,228,933.00)
		Aset Tetap Lainnya	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
	Jumlah		Rp946,792,454.00	Rp1,156,917,313.00	(Rp210,124,859.00)
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		Jumlah	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
3	ATB	Hak Cipta	Rp73,934.00	Rp73,934.00	Rp0.00
		Paten	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		Software	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		Lisensi	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		Hasil Kajian/Penelitian	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		ATB Lainnya	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
	Jumlah		Rp 73,934.00	Rp73,934.00	Rp0.00
4	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		Gedung dan Bangunan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		Aset Tetap Lainnya	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		Aset Tak Berwujud	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
	Jumlah		Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

Total	Rp946,866,388.00	Rp1,156,991,247.00	(Rp210,124,859.00)
--------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp65,875.00 dan Rp166,900.00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp101,025.00 atau 39.46% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester II TA 2024. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester II TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.10.1 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester II TA 2025 dan TA 2024

No.	Uraian		Semester II TA 2025 (Rp)	Semester II TA 2024 (Rp)	Kenaiikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	Rp65,875.00	Rp166,900.00	Rp101,025.00
		Bagian Lancar TP/TGR	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		Piutang dari Kegiatan BLU	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
	Jumlah				
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		Piutang Jangka Panjang Lainnya	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
		Jumlah			
	Total		Rp65,875.00	Rp166,900.00	Rp101,025.00

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Semester II TA 2025, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp13,143,357,308.00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1,578,799,315.00 atau 10.724% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Semester II TA 2024 sebesar Rp14,722,156,623.00.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian Semester II TA 2025 dan TA 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2 Kegiatan Non Operasional Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Semester II TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Semester II TA 2025 (Rp)	Semester II TA 2024 (Rp)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	Rp5,213,000.00	Rp6,601,577.00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp3,014,100.00	Rp51,285,194.00
Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp8,227,100.00	Rp57,886,771.00

D.3. SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp5,213,000.00 dan Rp6,601,577.00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1,388,577.00 atau 21.034% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Semester II TA 2024.

D.4. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Semester I TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp5,213,000.00 dan Rp6,601,577.00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Semester II TA 2025 mengalami mengalami penurunan sebesar Rp1,388,577.00 atau 21.034% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Semester II TA 2024.

Tabel D.4.1 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset NonLancar Semester II TA 2025

Uraian	Satker	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	BRMP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	BRMP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	BRMP	Rp5,213,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp5,213,000.00	Rp0.00
Jumlah		Rp5,213,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp5,213,000.00	Rp0.00

D.5. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Semester II

TA 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Semester II TA 2024.

D.6. SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3,014,100.00 dan Rp51,285,194.00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp48,271,094.00 atau 94.123% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester II TA 2024.

D.7. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3,014,100.00 dan Rp51,285,194.00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp48,271,094.00 atau 94.123% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester II TA 2024.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester II TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

No.	Uraian			Satker	Semester II TA 2025 (Rp)	Semester II TA 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
			Terhadap Bendahara	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
			Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai TAYL	BRMP SDLP	Rp3,014,100.00	Rp51,285,194.00	(Rp48,271,094.00)
			Belanja Barang	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
			Belanja Modal	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
			Belanja Bantuan Sosial (tahun lalu ada bansos?)	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
3	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/Jasa	Aset Lainnya (Penjualan Alat Kantor)	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
4	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
5	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah					Rp3,014,100.00	Rp51,285,194.00	(Rp48,271,094.00)

D.8. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester II TA 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester II TA 2024. Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester II TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.1 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I TA 2025

No	Uraian			Satker	Semester II TA 2025 (Rp)	Semester II TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	BRMP SDLP	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
Jumlah					Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Semester II TA 2025, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian mengalami Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp8,227,100.00. Nilai surplus tersebut mengalami penurunan sebesar Rp49,659,671.00 atau 85.788%

apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Semester II TA 2024 sebesar Rp57,886,771.00.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.11. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Semester II TA 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Semester II TA 2024.

D.12. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Nilai Beban Luar Biasa Semester II TA 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Semester II TA 2024.

D.13. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Semester II TA 2025, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian mengalami Defisit LO sebesar Rp13,135,130,208.00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1,529,139,644.00 atau 10.428% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Semester II TA 2024 sebesar Rp14,664,269,852.00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing - masing disajikan sebesar Rp56,052,702,687.00 dan Rp55,957,124,100.00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp95,578,587.00 atau 0.17% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp13,135,130,208.00 dan Rp14,664,269,852.00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1,529,139,644.00 atau 10.43% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2024.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 dan TA 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2024.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0.00 dan koreksi kurang sebesar Rp0.00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.1.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Semester II TA 2025

No.	Uraian	Satker	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah		Rp0.00
1	Barang Konsumsi	BRMP SDLP	Rp0.00
2	Suku Cadang	BRMP SDLP	Rp0.00
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00

5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
8	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	BRMP SDLP	Rp0.00
9	Bahan Baku	BRMP SDLP	Rp0.00
		BRMP SDLP	Rp0.00
10	Persediaan Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
11	Transfer Keluar	BRMP SDLP	Rp0.00
12	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
13	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	BRMP SDLP	Rp0.00
14	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	BRMP SDLP	Rp0.00
15	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	BRMP SDLP	Rp0.00
16	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
17	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	BRMP SDLP	Rp0.00
B	Koreksi Kurang		Rp0.00
1	Barang Konsumsi	BRMP SDLP	Rp0.00
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
4	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	BRMP SDLP	Rp0.00
5	Bahan Baku	BRMP SDLP	Rp0.00
6	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	BRMP SDLP	Rp0.00
7	Persediaan Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
8	Beban Persediaan konsumsi	BRMP SDLP	Rp0.00
9	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
10	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	BRMP SDLP	Rp0.00

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 disajikan sebesar Rp0.00 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2024 disajikan sebesar Rp0.00 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi atas untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2024.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp,00 dan koreksi kurang sebesar Rp,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.2.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Semester II TA 2025

No.	Uraian	Satker	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah		Rp0.00
1	Barang Konsumsi	BRMP SDLP	Rp0.00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	BRMP SDLP	Rp0.00
3	Suku Cadang	BRMP SDLP	Rp0.00
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
7	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
8	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
9	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
10	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	BRMP SDLP	Rp0.00
11	Bahan Baku	BRMP SDLP	Rp0.00
12	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	BRMP SDLP	Rp0.00
13	Persediaan Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
14	Persediaan yang Belum Diregister	BRMP SDLP	Rp0.00
15	Tanah	BRMP SDLP	Rp0.00
16	Peralatan dan Mesin	BRMP SDLP	Rp0.00
17	Gedung dan Bangunan	BRMP SDLP	Rp0.00
18	Jalan dan Jembatan	BRMP SDLP	Rp0.00

19	Irigasi	BRMP SDLP	Rp0.00
20	Jaringan	BRMP SDLP	Rp0.00
21	Aset Tetap Renovasi	BRMP SDLP	Rp0.00
22	Konstruksi Dalam pengerjaan	BRMP SDLP	Rp0.00
23	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BRMP SDLP	Rp0.00
24	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	BRMP SDLP	Rp0.00
25	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
B	Koreksi Kurang		Rp0.00
1	Barang Konsumsi	BRMP SDLP	Rp0.00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	BRMP SDLP	Rp0.00
3	Pita Cukai, Materai dan Leges	BRMP SDLP	Rp0.00
4	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
7	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
8	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
9	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
10	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
11	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	BRMP SDLP	Rp0.00
12	Bahan Baku	BRMP SDLP	Rp0.00
13	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	BRMP SDLP	Rp0.00
14	Persediaan Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
15	Tanah	BRMP SDLP	Rp0.00
16	Peralatan dan Mesin	BRMP SDLP	Rp0.00
17	Gedung dan Bangunan	BRMP SDLP	Rp0.00
18	Jaringan	BRMP SDLP	Rp0.00
19	Aset Tetap Renovasi	BRMP SDLP	Rp0.00
20	Konstruksi Dalam pengerjaan	BRMP SDLP	Rp0.00
21	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BRMP SDLP	Rp0.00

22	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	BRMP SDLP	Rp0.00
23	Akumulasi Penyusutan Irigasi	BRMP SDLP	Rp0.00
24	Koreksi Nilai Persediaan	BRMP SDLP	Rp0.00

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp125,827,000.00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 dan TA 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp125,827,000.00 atau 100% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2024.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp,00 dan koreksi kurang sebesar Rp,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.3.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Semester II TA 2025

No.	Uraian	Satker	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah		Rp0.00
1	Kas Lainnya di BLU	BRMP SDLP	Rp0.00
2	Tanah	BRMP SDLP	Rp0.00
3	Peralatan dan Mesin	BRMP SDLP	Rp0.00
4	Gedung dan Bangunan	BRMP SDLP	Rp0.00
5	Jalan dan Jembatan	BRMP SDLP	Rp0.00
6	Irigasi	BRMP SDLP	Rp0.00
7	Jaringan	BRMP SDLP	Rp0.00
8	Aset Tetap Renovasi	BRMP SDLP	Rp0.00
9	Aset Tetap Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	BRMP SDLP	Rp0.00
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BRMP SDLP	Rp0.00
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	BRMP SDLP	Rp0.00
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	BRMP SDLP	Rp0.00
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	BRMP SDLP	Rp0.00
15	Aset Tetap yang Belum Diregister	BRMP SDLP	Rp0.00
16	Software	BRMP SDLP	Rp0.00

17	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	BRMP SDLP	Rp0.00
18	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	BRMP SDLP	Rp0.00
19	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	BRMP SDLP	Rp0.00
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	BRMP SDLP	Rp0.00
21	Akumulasi Amortisasi Software	BRMP SDLP	Rp0.00
22	Akumulasi Amortisasi Lisensi	BRMP SDLP	Rp0.00
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	BRMP SDLP	Rp0.00
24	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
25	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	BRMP SDLP	Rp0.00
26	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
27	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	BRMP SDLP	Rp0.00
28	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	BRMP SDLP	Rp0.00
B	Koreksi Kurang		Rp0.00
1	Tanah	BRMP SDLP	Rp0.00
2	Peralatan dan Mesin	BRMP SDLP	Rp0.00
3	Gedung dan Bangunan	BRMP SDLP	Rp0.00
4	Jalan dan Jembatan	BRMP SDLP	Rp0.00
5	Irigasi	BRMP SDLP	Rp0.00
6	Jaringan	BRMP SDLP	Rp0.00
7	Aset Tetap Renovasi	BRMP SDLP	Rp0.00
8	Aset Tetap Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
9	Konstruksi Dalam pengerjaan	BRMP SDLP	Rp0.00
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	BRMP SDLP	Rp0.00
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	BRMP SDLP	Rp0.00
12	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	BRMP SDLP	Rp0.00
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	BRMP SDLP	Rp0.00
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	BRMP SDLP	Rp0.00
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00

16	Software	BRMP SDLP	Rp0.00
17	Lisensi	BRMP SDLP	Rp0.00
18	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	BRMP SDLP	Rp0.00
19	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	BRMP SDLP	Rp0.00
20	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	BRMP SDLP	Rp0.00
21	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	BRMP SDLP	Rp0.00
22	Akumulasi Amortisasi Software	BRMP SDLP	Rp0.00
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	BRMP SDLP	Rp0.00
24	Belanja	BRMP SDLP	Rp0.00
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	BRMP SDLP	Rp0.00
26	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	BRMP SDLP	Rp0.00
27	Beban Persediaan Rusak/Usang	BRMP SDLP	Rp0.00

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp000. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 dan TA 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2024.

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0.00 dan koreksi kurang sebesar Rp0.00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.4.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Semester II TA 2025

No.	Uraian	Satker	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah		Rp0.00
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	BRMP SDLP	Rp0.00
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	BRMP SDLP	Rp0.00
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	BRMP SDLP	Rp0.00
4	Piutang Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	BRMP SDLP	Rp0.00

6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	BRMP SDLP	Rp0.00
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	BRMP SDLP	Rp0.00
9	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	BRMP SDLP	Rp0.00
10	Piutang Jangka Panjang lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	BRMP SDLP	Rp0.00
12	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
13	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	BRMP SDLP	Rp0.00
14	Koreksi Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
15	Beban Honor Output Kegiatan	BRMP SDLP	Rp0.00
16	Beban Sewa	BRMP SDLP	Rp0.00
17	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
18	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	BRMP SDLP	Rp0.00
19	Beban Persediaan Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
20	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
21	Beban Persediaan Rusak/Usang	BRMP SDLP	Rp0.00
B	Koreksi Kurang		Rp0.00
1	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	BRMP SDLP	Rp0.00
2	Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	BRMP SDLP	Rp0.00
3	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	BRMP SDLP	Rp0.00
4	Piutang Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
5	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	BRMP SDLP	Rp0.00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	BRMP SDLP	Rp0.00
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
8	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	BRMP SDLP	Rp0.00

9	Piutang Jangka Panjang lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	BRMP SDLP	Rp0.00
11	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
12	Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	BRMP SDLP	Rp0.00
13	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	BRMP SDLP	Rp0.00
14	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
15	Koreksi Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
16	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	BRMP SDLP	Rp0.00
17	Beban Bahan	BRMP SDLP	Rp0.00
18	Beban Jasa Profesi	BRMP SDLP	Rp0.00
19	Beban Persediaan Lainnya	BRMP SDLP	Rp0.00
20	Beban Persediaan Rusak/Usang	BRMP SDLP	Rp0.00

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12,750,294,395.00 dan Rp12,958,342,908.00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp208,048,514.00 atau 1.60% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp537,164,549.00 dan Rp 265,015,103.00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp272,149,446.00 atau 102.69% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2024.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2024.

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2024.

E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2024.

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Semester II TA 2025, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian mengalami penurunan ekuitas sebesar Rp521,292,770.00. Nilai penurunan tersebut lebih tinggi sebesar Rp616,871,357.00 atau 645.41% apabila dibandingkan dengan kenaikan ekuitas Semester II TA 2024 sebesar Rp95,578,587.00.

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 dan TA 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp55,531,409,917.00 dan Rp56,052,702,687.00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp521,292,770.00 atau 0.93% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan Semester II TA 2024.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian kejadian penting setelah tanggal Neraca yang perlu di ungkapkan dalam laporan Keuangan ini.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

1. Informasi Rekening Satuan Kerja

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, maka Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian telah melaporkan laporan bulanan terkait dengan rekening yang dikelolanya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah.

Selama tahun 2025, satuan kerja Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian mengelola 9 rekening yang terdiri dari 1 rekening Bendahara Pengeluaran (Virtual Account) dan 8 rekening penampungan lainnya untuk menampung dana hibah dan kerjasama (Kemitraan). Rincian rekening pemerintah yang dikelola satuan kerja Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel F.2

Rincian Rekening Satuan Kerja

No. Rekening	Nama Rekening	Surat Ijin	
		Nomor	Tanggal
65017237242 1000	BPG 023 BALAI BPSI SDLP	S-750/KPN.1205/2023	10-04-2023
00120100479 0303	RPL 140 PDHL BBSDL UNTUK – 22227WN8A	000411	06-11-2023
00120100401 6301	RPL 140 PDHL BBSDL UNTUK 2W2H8PD	000095	25-01-2021
00120100488 7304	RPL 140 PDHL UNTUK 2JL7VCNA	000316	14-10-2024
00120100491 7303	RPL 023 KS BBPSI SDLP UTK SID RIAU	000430	11-02-2025

00120100493 1307	RPL 023 KS BBPSISDLP SID OGAN ILIR	000442	24-03-2025
00120100495 7303	RPL 023 KS BBPMSDLP UTK BPMP	000467	17-07-2025
00120100495 8309	RPL 023 KS BRMPSDLP SID JAMBI	000470	24-07-2025

2. Hibah

a. Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI)

Pada tahun 2023, terdapat hibah pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian yaitu kegiatan *National Soil Information Systems to Support The Transformation of Agrifood Systems in AFACI Countries*. Adapun pendonor hibah tersebut adalah Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) International Teknologi Cooperation Center RDA, 300 Nongsaengmyeong-ro, Doekjin-gu Jeonju-si, 54875 Republic of Korea dengan nomor perjanjian hibah LOA.18.09.2023. Nomor register kegiatan hibah tersebut adalah 2227WN8A dan telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan surat nomor S-687/PR.8/2023 tanggal 26 Oktober 2023. Jangka waktu pelaksanaan hibah AFACI ini adalah selama 3 (tiga) tahun, dimulai pada tanggal 18 September 2023 – 18 September 2026 dengan nilai total hibah sebesar USD 90.000. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah dilakukan pengesahan dana hibah berupa pendapatan sebesar Rp484,950,000.00 dan belanja terkait hibah sebesar Rp477,312,756.00. Sisa dana hibah sebesar Rp344,867,494.00 akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan ditahun 2026.

b. Crop Health and Nutrient Management of Shallot-Chilli-Rice Cropping System in Coastal Indonesia

Pada tahun 2020 terdapat hibah pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian yaitu Crop Health and Nutrient Management of Shallot-Chilli-Rice Cropping System in Coastal Indonesia. Nomor register kegiatan hibah adalah 2W2H8PDA dan telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan surat nomor: S-5/PR.8/2021 Tanggal 6 Januari 2021. Perjanjian kerjasama hibah dengan ACIAR tersebut tertuang dalam MoU Nomor: SLAM/2018/145/237242. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah dilakukan pengesahan dana hibah berupa pendapatan sebesar Rp626,600,363.00 dan belanja terkait hibah sebesar Rp261,611,681.00. Sisa dana hibah sebesar Rp364,990,316.00 akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan ditahun 2026.

c. Indonesia Testbed Project

Pada bulan Agustus 2024, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian menjalin Kerjasama dengan *Korean Agriculture Technology Promotion Agency* (KOAT) untuk melakukan pengujian produk pupuk Indonesia.

Nomor register kegiatan hibah adalah 2JL7VCNA dan telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan surat nomor: S-643/PR.8/2024 Tanggal 4 Oktober 2024. Perjanjian

kerjasama hibah dengan KoAT tersebut tertuang dalam MoU Nomor: KoAT.20.10.2024 Tanggal 20 Agustus 2024. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah dilakukan pengesahan dana hibah berupa pendapatan sebesar Rp663,867,900.00 dan belanja terkait hibah sebesar Rp635,786,234.00. Sisa dana hibah sebesar Rp558,937,966.00 akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan ditahun 2026.

3. Pengembalian Tunjangan Fungsional Pegawai

Terdapat 1 pegawai Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian yang memiliki piutang Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional Peneliti periode September 2022 sampai dengan Desember 2025 dengan nilai total sebesar Rp31,500,000.00. Nilai Tersebut merupakan nilai total Tunjangan Fungsional Peneliti dikurangkan dengan nilai setoran pengembalian sampai dengan 30 September 2024 dan Tunjangan Fungsional Umum. Sampai dengan 31 Desember 2025 telah dilakukan pembayaran pengembalian tunjangan fungsional pegawai an. Anggri Hervani sebesar Rp13,175,000.00 dan sisa piutang sebesar Rp20,205,000.00.

4. Kegiatan Survei, Investigasi, dan Desain (SID) BRMP SDLP

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (BRMP SDLP) telah melaksanakan kegiatan Survei, Investigasi, dan Desain (SID) sebagai bagian dari upaya penyediaan data teknis dan perencanaan pengembangan lahan pertanian yang akurat dan terintegrasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kondisi eksisting lahan, potensi sumber daya lahan, serta kelayakan teknis lokasi sebagai dasar penyusunan rekomendasi pengelolaan dan pengembangan pertanian berkelanjutan.

Pelaksanaan SID dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder, yang meliputi survei lapangan, pengukuran topografi, identifikasi jenis tanah, kondisi hidrologi, ketersediaan sumber air, aksesibilitas wilayah, serta inventarisasi sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, dilakukan pula wawancara dengan pemangku kepentingan setempat guna memperoleh informasi sosial ekonomi dan pola pengelolaan lahan yang telah berjalan.

Tahapan investigasi difokuskan pada analisis karakteristik fisik lahan, tingkat kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian, serta identifikasi kendala teknis yang berpotensi memengaruhi keberhasilan pengembangan. Berdasarkan hasil survei dan investigasi tersebut, BRMP SDLP selanjutnya menyusun desain teknis yang mencakup tata letak kawasan, sistem pengelolaan air, rekomendasi perbaikan lahan, serta rencana pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan.

Hasil kegiatan SID Tahun 2025 antara lain :

1. OPLA 2024

- Dari target 243 Brigade Pangan (BP), telah terbentuk 229 BP yang tersebar di 5 kecamatan
- 1973 Unit Alsintan Pra-tanam yang telah tersalurkan (TR4, TR2, Rotavator, dan Pompa)
- 30 Unit Alsintan Pasca panen (Combine Harvester) yang telah tersalurkan

2. OPLA 2025

- Dari target 49 Brigade Pangan (BP), telah terbentuk 46 BP yang tersebar di 6 kecamatan. (3 BP tidak terbentuk karena ada pengunduran diri dari program Opla)
- 583 Unit Alsintan Pra-tanam yang telah tersalurkan (TR4, TR2, Rotavator, dan Pompa)

- 21 Unit Alsintan Pasca panen (Combine Harvester) yang telah tersalurkan

3. Cetak Sawah Rakyat

- Dari target 54 Brigade Pangan (BP), telah terbentuk 38 BP yang tersebar di 10 kecamatan. (16 BP belum terbentuk karena belum konstruksi)
- 86 Unit Alsintan Pra-tanam yang telah tersalurkan (TR4, TR2, Rotavator, dan Pompa)
- 8 Unit Alsintan Pasca panen (Combine Harvester) yang telah tersalurkan

4. Kenaikan Luas Tambah Tanam

- Luas Tambah Tanam meningkat 14,129% (16,861 Ha)

5. Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian Nomor: 08/OT.050/H.8/01/2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian Nomor B-08/OT.050/H.8/01/2025 Tentang Penunjukan Pengelola Anggaran pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian Tahun Anggaran 2025

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Asdianto, SP., MT
Pejabat Pembuat Komitmen	: Aris Dwi Saputra, SE
Pejabat Penandatangan SPM	: Anik Hastuti,SP.,MM
Bendahara Pengeluaran	: Haryani, SE
Operator Pelaporan	: Teguh Mulyono, SM
Bendahara Penerimaan	: Tedy Januar, SE
Operator Pelaporan	: Wiwit Winarto, A.Md
Operator BMN	: Tulus Arizon, A.Md
Operator Persediaan	: Nurmani, A.Md
Operator Piutang	: Wiwit Winarto, A.Md

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Asdianto, SP., M.T
Pejabat Pembuat Komitmen	: Teguh Mulyono, S.M
Pejabat Penandatangan SPM	: Anik Hastuti, S.P.,M.M
Bendahara Pengeluaran	: Haryani, SE
Operator Pelaporan	: Aris Dwi Saputra, SE

Bendahara Penerimaan	: Budi Santoso
Operator Pelaporan	: Aris Dwi Saputra, SE
Operator BMN	: Tulus Arizon, A.Md
Operator Persediaan	: Nanda Pratama Damiga, A.Md.Si
Operator Piutang	: Budi Santoso

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 17
Tanggal : 28 November 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(018)	KEMENTERIAN PERTANIAN
2. Unit Organisasi	:	(09)	BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
3. Provinsi	:	(02)	JAWA BARAT
4. Kode>Nama Satker	:	(237242)	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
Sebesar	:	Rp. 13.377.417.000	(TIGA BELAS MILIAR TIGA RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS TUJUH BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
04 EKONOMI
04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	11.952.891.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	40.149.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	1.384.377.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	1.384.377.000
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN B O G O R	(023) Rp.	11.993.040.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	1.384.377.000
-------------------	-----------	----------------	-----------------------------------	-----------	---------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

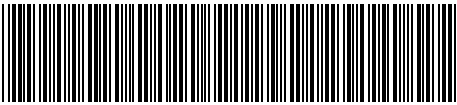
NOMOR : DIPA- 018.09.2.237242/2025



Satker : (237242) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	1.424.526.000
EC.7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp.	1.424.526.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	11.952.891.000
WA.6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp.	11.952.891.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 018.09.2.237242/2025
I A. INFORMASI KINERJA



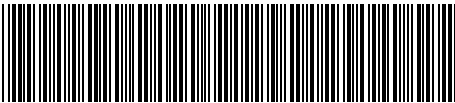
DS:8205-0257-9802-8954

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (237242) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

Halaman : I A. 1

Program	:	018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			1.424.526.000
Kegiatan	:	7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian			1.424.526.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase produk usaha tani yang tersertifikasi (%)			
	:	2. 01	Presentase pelaku usaha pertanian yang menerapkan standar pertanian (%)			
	:	3. 02	Indeks kepuasan layanan pengujian			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7911.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	3,00	Produk	1.384.377.000
Rincian Output	:	01 BJA.107	Laporan Hasil Uji Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	3.00	Produk	1.384.377.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7911.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7,00	Unit	40.149.000
Rincian Output	:	01 CAG.104	Sarana Laboratorium SDLP Modern	7.00	Unit	40.149.000
Program	:	018.09.WA	Program Dukungan Manajemen			11.952.891.000
Kegiatan	:	6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian			11.952.891.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian			
	:	2. 01	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian			
	:	3. 02	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian			
	:	4. 02	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian			
	:	5. 03	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian			
	:	6. 03	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian			
	:	7. 04	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian			
	:	8. 04	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian			
	:	9. 05	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian			
	:	10. 05	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 018.09.2.237242/2025
I A. INFORMASI KINERJA

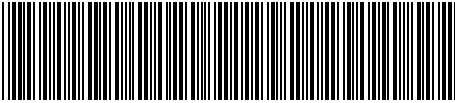


DS:8205-0257-9802-8954

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (237242) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian								
	11.	06	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian					
	12.	06	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian					
	13.	07	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura					
	14.	07	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura					
	15.	08	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan					
	16.	08	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan					
	17.	09	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan					
	18.	09	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan					
	19.	10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan					
	20.	10	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan					
	21.	11	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian					
	22.	11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi					
	23.	12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner					
	24.	12	Persentase rekomendasi BPK atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian terkait Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang ditindaklanjuti Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian					
	25.	13	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal					
	26.	14	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner					
	27.	15	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6918.AEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	1.195.000.000	
Rincian Output		:	01	AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1,00	kegiatan	1.195.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 018.09.2.237242/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:8205-0257-9802-8954

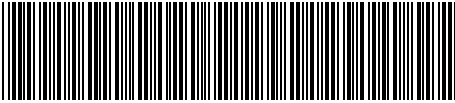
Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (237242) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

Klasifikasi Rincian Output	2	:	6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	10.671.391.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	10.000.000
		:	02	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	74.000.000
		:	03	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	414.500.000
		:	04	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	10.172.891.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	86.500.000
Rincian Output		:	01	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	86.500.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

ttd.
Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si, GRCE
NIP. 196903141994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 018.09.2.237242/2025
I B. SUMBER DANA



DS:8205-0257-9802-8954

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (237242) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	13.377.417.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1.1. Rupiah Murni	Rp.	11.952.891.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	1.384.377.000		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	1.384.377.000		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	ASIANFOODANDAGRI LOA18.09.2023 2227WN8A	USD USD IDR	30,03 480.471,00	5	480.471			
2	2	KOREAAGRICULTURET KoAT-20.08.2024 2JL7VCNA	USD USD IDR	40,14 642.156,00	5	642.156			
3	2	AUSTRALIANCENTREF DA-29.12.2020/23 2W2H8PDA	AUD USD IDR	16,36 261.750,00	5	261.750			

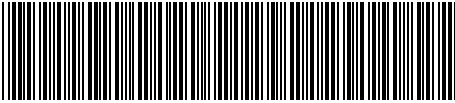
DS:8205-0257-9802-8954

DS:8205-0257-9802-8954

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER		
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
237242	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	3.818.219	9.519.049	40.149	-	-	13.377.417	02 . 52			
	018.09.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	-	1.384.377	40.149	-	-	1.424.526				
	7911 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	-	1.384.377	40.149	-	-	1.424.526				
	7911.BJA Penyidikan dan Pengujian Produk	-	1.384.377	-	-	-	1.384.377				
	(02.52 JAWA BARAT / KOTA BOGOR)										
	11 HLL	-	480.471	-	-	-	480.471			140	- 2227WN8A
	11 HLL	-	642.156	-	-	-	642.156			140	- 2JL7VCNA
	11 HLL	-	261.750	-	-	-	261.750			140	- 2W2H8PDA
	7911.CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	40.149	-	-	40.149			02 . 52	
	(02.52 JAWA BARAT / KOTA BOGOR)										
	04 PNBP	-	-	40.149	-	-	40.149			023	
	018.09.WA Program Dukungan Manajemen	3.818.219	8.134.672	-	-	-	11.952.891				
6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	3.818.219	8.134.672	-	-	-	11.952.891				

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 018.09.2.237242/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:8205-0257-9802-8954

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (237242) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
Kewenangan : (KD)

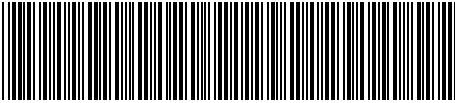
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6918.AEA	Koordinasi	-	1.195.000	-	-	-	1.195.000	02 . 52	
	(02.52 JAWA BARAT / KOTA BOGOR)								
01 RM		-	1.195.000	-	-	-	1.195.000	023@	
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.818.219	6.853.172	-	-	-	10.671.391	02 . 52	
	(02.52 JAWA BARAT / KOTA BOGOR)								
01 RM		3.818.219	6.853.172	-	-	-	10.671.391	023@	
6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	86.500	-	-	-	86.500	02 . 52	
	(02.52 JAWA BARAT / KOTA BOGOR)								
01 RM		-	86.500	-	-	-	86.500	023@	
JUMLAH		3.818.219	9.519.049	40.149	-	-	13.377.417		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

ttd.
Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si, GRCE
NIP. 196903141994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 018.09.2.237242/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:8205-0257-9802-8954

Kementerian Negara/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode/Nama Satker : (237242) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

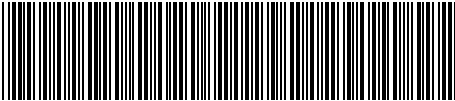
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	237242	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian													
		RENCANA PENARIKAN DANA	318.677	661.124	1.235.571	624.276	924.656	1.444.322	786.176	797.990	965.729	1.203.887	2.764.990	1.650.018	13.377.417
		BELANJA PEGAWAI	254.345	277.961	550.087	275.797	261.878	515.669	270.104	275.362	271.563	270.104	270.104	325.245	3.818.219
		BELANJA BARANG	64.333	383.162	685.484	348.478	662.777	928.654	516.073	522.628	694.166	893.635	2.494.887	1.324.773	9.519.049
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.149	0	0	40.149
		Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.149	1.384.377	0	1.424.526
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.384.377	0	1.384.377
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.149	0	0	40.149
		Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	318.677	661.124	1.235.571	624.276	924.656	1.444.322	786.176	797.990	965.729	1.163.738	1.380.613	1.650.018	11.952.891
		51 BELANJA PEGAWAI	254.345	277.961	550.087	275.797	261.878	515.669	270.104	275.362	271.563	270.104	270.104	325.245	3.818.219
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	64.333	383.162	685.484	348.478	662.777	928.654	516.073	522.628	694.166	893.635	1.110.510	1.324.773	8.134.672
		PERKIRAAN PENERIMAAN	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	12.833	4.587	63.250
		- PNBP (425131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.250	0	8.250
		- PNBP (425432)	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.583	4.587	55.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

ttd.
Prof. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si, GRCE
NIP. 196903141994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 018.09.2.237242/2025
IV A. B L O K I R



DS:8205-0257-9802-8954

Kementerian Negara/Lembaga : [018] KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : [09] BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [237242] Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

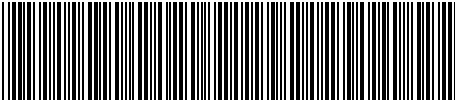
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
237242	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 436.500		
	52 Belanja Barang Rp. 436.500		
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen		
6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian		
6918.AEA	Koordinasi		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 289.950		
	termasuk kategori belanja yang perlu dilakukan efisiensi		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.050		
	termasuk kategori belanja yang perlu dilakukan efisiensi		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 88.500		
	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.000		
	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

ttd.
Prof. Dr. Ir. Fadry Djufray, M.Si, GRCE
NIP. 196903141994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 018.09.2.237242/2025
IV B. C A T A T A N



DS:8205-0257-9802-8954

Kementerian Negara/Lembaga : [018] KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi : [09] BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [237242] Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Pertanian
KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

ttd.
Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufray, M.Si, GRCE
NIP. 196903141994031001

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORG (09) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
UNIT KERJA (237242) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
ALOKASI Rp. 13,377,417,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			1,424,526,000	
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian			1,424,526,000	
7911.BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk[Base Line]	3.0 Produk		1,384,377,000	
	Lokasi : KOTA BOGOR				
7911.BJA.107	Laporan Hasil Uji Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	3.0 Produk		1,384,377,000	
051	Pengujian Instrumen Tanah, Air, Tanaman, Pembenahan Tanah dan Pupuk			1,384,377,000	U
A	Crop Health and Nutrient Management of Shallot-Chili-Rice Cropping Systems in Coastal Indonesia			261,750,000	
521211	Belanja Bahan			11,007,000	HLN
	(KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 2W2H8PDA)				
	- Fotocopy, penggandaan, penjiilidan dan dokumentasi	6.0 PAKET	842,834	5,057,000	
	- Biaya konsumsi	85.0 OK	70,000	5,950,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			3,213,000	HLN
	(KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 2W2H8PDA)				
	- Biaya analisis	1.0 PAKET	3,213,000	3,213,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			92,530,000	HLN
	(KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 2W2H8PDA)				
	- ATK dan bahan komputer	1.0 PAKET	7,750,000	7,750,000	
	- Bahan pendukung kegiatan	2.0 PAKET	40,590,000	81,180,000	
	- Pembuatan leaflet	4.0 PAKET	900,000	3,600,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			154,000,000	HLN
	(KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 2W2H8PDA)				
	- Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan	154.0 OP	1,000,000	154,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1,000,000	HLN
	(KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 2W2H8PDA)				
	- Uang saku petani	20.0 OH	50,000	1,000,000	
B	National Soil Information System to Support The Transformation of Agrifood System in AFACI Countries			480,471,000	
521211	Belanja Bahan			11,233,000	HLN
	(KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 2227WN8A)				
	- Fotocopy, penggandaan, penjiilidan dan dokumentasi	4.0 PAKET	1,252,000	5,008,000	
	- Biaya konsumsi	83.0 OK	75,000	6,225,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			35,013,000	HLN
	(KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 2227WN8A)				
	- Uji laboratorium	1.0 PAKET	29,777,000	29,777,000	
	- Biaya pengiriman	1.0 PAKET	4,116,000	4,116,000	
	- Upah pembantu lapang	14.0 OH	80,000	1,120,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			60,000,000	HLN
	(KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 2227WN8A)				
	- ATK dan bahan komputer	1.0 PAKET	10,000,000	10,000,000	
	- Bahan pendukung kegiatan	2.0 PAKET	25,000,000	50,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(237242)
Rp. 13,377,417,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 2227WN8A) - Sewa kendaraan	11.0 UH	1,250,000	13,750,000 13,750,000	HLN
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 2227WN8A) - Honor Narasumber	11.0 OJ	900,000	9,900,000 9,900,000	HLN
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 2227WN8A) - Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan	250.0 OP	1,402,300	350,575,000 350,575,000	HLN
C	<i>Indonesia Testbed Project The Korea Agriculture Technology Promotion Agency (KoAT)</i>			642,156,000	
	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 2JL7VCNA) - Fotocopy, penggandaan, penjilidan dan dokumentasi - Biaya konsumsi	5.0 PAKET 75.0 OK	1,300,000 70,000	6,500,000 5,250,000	HLN
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 2JL7VCNA) - Uji laboratorium - Upah pembantu lapang	1.0 PAKET 2915.0 OH	35,400,000 80,000	35,400,000 233,200,000	HLN
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 2JL7VCNA) - ATK dan bahan komputer - Bahan pendukung kegiatan	2.0 PAKET 4.0 PAKET	5,050,000 20,200,000	10,100,000 80,800,000	HLN
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 2JL7VCNA) - Sewa kendaraan	8.0 UH	962,500	7,700,000 7,700,000	HLN
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 2JL7VCNA) - Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan	175.0 OP	1,504,035	263,206,000 263,206,000	HLN
7911.CAG	<u>Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup[Base Line]</u>	7.0 Unit		40,149,000	

7911.CAG.104	Lokasi : KOTA BOGOR	7.0 Unit		40,149,000	
051	Sarana Laboratorium SDLP Modern			40,149,000	U
A	Alat Laboratorium Sumber Daya Lahan Pertanian			40,149,000	
	<i>Sarana Laboratorium IGAS</i>			40,149,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.023-Bogor) - Kartu Grafis Komputer (VGA) - Harddisk External Portable - Harddisk Portable SSD	1.0 UNIT 1.0 UNIT 5.0 UNIT	10,850,000 7,399,000 4,380,000	10,850,000 7,399,000 21,900,000	2 PNP
018.09.WA	<u>Program Dukungan Manajemen</u>			11,952,891,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(237242)
Rp. 13,377,417,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian			11,952,891,000	
6918.AEA	Koordinasi[Base Line]	1.0 kegiatan		1,195,000,000	
6918.AEA.101	Lokasi : KOTA BOGOR	1.0 kegiatan		1,195,000,000	
051	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian			1,195,000,000	U
A	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian			1,195,000,000	
	Program Strategis Kementerian Pertanian			1,195,000,000	
521211	Belanja Bahan			39,750,000	RM
	(KPPN.023-Bogor)				
	- Fotocopy	12400.0 LBR	500	6,200,000	
	- Konsumsi makan rapat	355.0 OK	63,000	22,365,000	
	- Bahan Cetak (Banner/spanduk/leaflet dll)	10.0 Buah	335,000	3,350,000	
	- Penjilidan	36.0 EKS	50,000	1,800,000	
	- Konsumsi snack rapat	355.0 OK	17,000	6,035,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			57,750,000	RM
	(KPPN.023-Bogor)				
	- Perangkat Uji Lapang	9.0 PAKET	6,050,000	54,450,000	
	- Perangkat Ukur pH	12.0 Unit	275,000	3,300,000	
522141	Belanja Sewa			115,500,000	RM
	(KPPN.023-Bogor)				
	- Sewa Kendaraan	77.0 UH	1,500,000	115,500,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			22,000,000	RM
	(KPPN.023-Bogor)				
	- Honor Narasumber	22.0 OJ	1,000,000	22,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			914,400,000	2 RM
	(KPPN.023-Bogor)				
	- Blokir Perjalanan Dinas	1.0 Paket	289,950,000	289,950,000	*
	- Transport ke Kabupaten Sumatera Selatan	88.0 OK	410,000	36,080,000	
	- Transport Bandara	187.0 OK	400,000	74,800,000	
	- Penginapan	228.0 OH	600,000	136,800,000	
	- Transport Jakarta	56.0 OK	400,000	22,400,000	
	- Uang Harian perjalanan dinas Jakarta	110.0 OH	317,000	34,870,000	
	- Transport tiket pesawat	49.0 OK	2,247,348	110,120,000	
	- Uang Harian perjalanan dinas Sumatera Selatan	551.0 OH	380,000	209,380,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			45,600,000	2 RM
	(KPPN.023-Bogor)				
	- Blokir Bantuan Transport lokal	1.0 Paket	25,050,000	25,050,000	*
	- Bantuan Transport lokal (137 petani/penyuluh x 1 hari) - Sumatera Selatan	137.0 OK	150,000	20,550,000	
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	4.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi,		10,671,391,000	
	Lokasi : KOTA BOGOR				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(237242)
Rp. 13,377,417,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6918.EBA.956 051 A 521211 521811 524111 6918.EBA.958 051 A 521211 521811 524111 B	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line] Lokasi : KOTA BOGOR	Unit			
	Layanan BMN	1.0 Layanan		10,000,000	
	Pelaksanaan Pengelolaan BMN			10,000,000	
	Pengelolaan BMN			10,000,000	
	Belanja Bahan (KPPN.023-Bogor)			1,500,000	RM
	- Fotocopi, penjiilidan dan penggandaan naskah	1.0 PAKET	1,500,000	1,500,000	
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.023-Bogor)			3,500,000	RM
	- ATK dan bahan komputer	1.0 PAKET	3,500,000	3,500,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.023-Bogor)			5,000,000	2 RM
	- Blokir perjadiin	1.0 Paket	1,500,000	1,500,000	*
	- Uang Harian perjalanan dinas	8.0 OH	300,000	2,400,000	
	- Transport	5.0 OK	220,000	1,100,000	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.0 Layanan		74,000,000	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			74,000,000	U
	Layanan Hubungan Masyarakat			60,000,000	
	Belanja Bahan (KPPN.023-Bogor)			10,000,000	RM
	- Fotocopi, penjiilidan dan penggandaan naskah	1.0 PAKET	1,000,000	1,000,000	
	- Konsumsi rapat	200.0 OK	20,000	4,000,000	
	- Pencetakan bahan, brosur, leaflet	1.0 PAKET	3,000,000	3,000,000	
	- Bahan bantu diseminasi	10.0 PAKET	200,000	2,000,000	
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.023-Bogor)			5,000,000	RM
	- ATK dan bahan komputer	2.0 PAKET	2,500,000	5,000,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.023-Bogor)			45,000,000	2 RM
	- Blokir perjadiin	1.0 Paket	30,000,000	30,000,000	*
	- Transport Jakarta	3.0 OK	200,000	600,000	
	- Uang Harian perjalanan dinas Jakarta	6.0 OH	300,000	1,800,000	
	- Uang Harian perjalanan dinas	26.0 OH	400,000	10,400,000	
	- Transport	4.0 OK	300,000	1,200,000	
	- Penginapan	5.0 OH	200,000	1,000,000	
	Pengelolaan Informasi Publik			14,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORG (09) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
UNIT KERJA (237242) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
ALOKASI Rp. 13,377,417,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.023-Bogor) - Fotocopi, penjiilidan dan penggandaan naskah - Konsumsi rapat	1.0 PAKET 35.0 OK	800,000 20,000	1,500,000 800,000 700,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.023-Bogor) - ATK dan bahan komputer	1.0 PAKET	2,500,000	2,500,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.023-Bogor) - Blokir perjadiin - Uang Harian perjalanan dinas - Transport - Penginapan	1.0 Paket 14.0 OH 4.0 OK 1.0 OH	3,000,000 400,000 300,000 200,000	10,000,000 3,000,000 5,600,000 1,200,000 200,000	2 *
6918.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		414,500,000	
051	Layanan Kerumahtanggaan dan Umum			414,500,000	
A	<i>Penyusunan Program dan Anggaran</i>			112,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.023-Bogor) - Fotocopi, penjiilidan dan penggandaan naskah - Konsumsi rapat	1.0 PAKET 50.0 OK	1,500,000 20,000	2,500,000 1,500,000 1,000,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.023-Bogor) - ATK dan bahan komputer	3.0 PAKET	2,500,000	7,500,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.023-Bogor) - Blokir perjadiin - Transport - Uang Harian perjalanan dinas Jakarta - Uang Harian perjalanan dinas - Transport - Penginapan	1.0 Paket 49.0 OK 62.0 OH 98.0 OH 38.0 OK 33.0 OH	15,250,000 200,000 300,000 400,000 300,000 250,000	102,500,000 15,250,000 9,800,000 18,600,000 39,200,000 11,400,000 8,250,000	2 *
E	<i>Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kemampuan SDM</i>			84,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.023-Bogor) - Fotocopi, penjiilidan dan penggandaan naskah - Konsumsi rapat	1.0 PAKET 50.0 OK	1,000,000 20,000	2,000,000 1,000,000 1,000,000	RM
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.023-Bogor) - Peningkatan kemampuan SDM - Biaya sertifikasi ISO	2.0 PAKET 1.0 PAKET	5,000,000 15,000,000	25,000,000 10,000,000 15,000,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORG (09) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
UNIT KERJA (237242) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
ALOKASI Rp. 13,377,417,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.023-Bogor)			5,000,000	RM
	- ATK dan bahan komputer	2.0 PAKET	2,500,000	5,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.023-Bogor)			2,000,000	RM
	- Honor Narasumber	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.023-Bogor)			50,000,000	2 RM
	- Blokir perjadi	1.0 Paket	5,000,000	5,000,000	*
	- Transport Jakarta	6.0 OK	200,000	1,200,000	
	- Uang Harian perjalanan dinas Jakarta	99.0 OH	300,000	29,700,000	
	- Uang Harian perjalanan dinas Jawa Barat	12.0 OH	400,000	4,800,000	
	- Transport	15.0 OK	300,000	4,500,000	
	- Penginapan	16.0 OH	300,000	4,800,000	
F	<i>Koordinasi, Sinkronisasi Kelembagaan dan Kerumahtanggaan</i>			150,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.023-Bogor)			5,000,000	RM
	- Fotocopi, penjiilidan dan penggandaan naskah	1.0 PAKET	800,000	800,000	
	- Konsumsi rapat	70.0 OK	60,000	4,200,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.023-Bogor)			10,000,000	RM
	- ATK dan bahan komputer	4.0 PAKET	2,500,000	10,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.023-Bogor)			15,000,000	RM
	- Honor Narasumber	15.0 OJ	1,000,000	15,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.023-Bogor)			120,500,000	2 RM
	- Blokir perjadi	1.0 Paket	15,750,000	15,750,000	*
	- Uang Harian perjalanan dinas	100.0 OH	400,000	40,000,000	
	- Transport	23.0 OK	1,200,000	27,600,000	
	- Penginapan	39.0 OH	350,000	13,650,000	
	- Transport Jakarta	32.0 OK	200,000	6,400,000	
	- Uang Harian perjalanan dinas Jakarta	57.0 OH	300,000	17,100,000	
H	<i>Pengelolaan Keuangan dan SAP</i>			67,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.023-Bogor)			1,000,000	RM
	- Fotocopi, penjiilidan dan penggandaan naskah	1.0 PAKET	1,000,000	1,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.023-Bogor)			6,500,000	RM
	- ATK dan bahan komputer	4.0 PAKET	1,625,000	6,500,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(237242)
Rp. 13,377,417,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			60,000,000	2
	(KPPN.023-Bogor)				
	- Blokir perjadiin	1.0 Paket	18,000,000	18,000,000	*
	- Transport	24.0 OK	200,000	4,800,000	
	- Uang Harian perjalanan dinas	109.0 OH	300,000	32,700,000	
6918.EBA.994 001 A	- Penginapan	15.0 OH	300,000	4,500,000	
	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		10,172,891,000	
	Gaji dan Tunjangan			3,818,219,000	U
	<i>Pembayaran gaji dan tunjangan</i>			<i>3,818,219,000</i>	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u>			2,595,475,000	
	(KPPN.023-Bogor)				RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	2,223,481,000	2,223,481,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	181,797,000	181,797,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	190,197,000	190,197,000	
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u>			41,000	
	(KPPN.023-Bogor)				RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	34,000	34,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,000	3,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	4,000	4,000	
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u>			193,154,000	
	(KPPN.023-Bogor)				RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	165,544,000	165,544,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	13,530,000	13,530,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	14,080,000	14,080,000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u>			35,883,000	
	(KPPN.023-Bogor)				RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	30,629,000	30,629,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,627,000	2,627,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,627,000	2,627,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u>			43,122,000	
	(KPPN.023-Bogor)				RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	37,112,000	37,112,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,005,000	3,005,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,005,000	3,005,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u>			274,463,000	
	(KPPN.023-Bogor)				RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	230,133,000	230,133,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	22,165,000	22,165,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	22,165,000	22,165,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(237242)
Rp. 13,377,417,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.023-Bogor)			28,711,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	6,927,000	6,927,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	10,067,000	10,067,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	11,717,000	11,717,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.023-Bogor)			124,585,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	124,585,000	124,585,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.023-Bogor)			336,370,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	336,370,000	336,370,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.023-Bogor)			49,500,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	40,000,000	40,000,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	4,750,000	4,750,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	4,750,000	4,750,000	
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.023-Bogor)			91,943,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	79,127,000	79,127,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	6,408,000	6,408,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	6,408,000	6,408,000	
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.023-Bogor)			4,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.0 THN	2,000	2,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (Gaji ke 13)	1.0 BLN	1,000	1,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (Gaji ke 14)	1.0 BLN	1,000	1,000	
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.023-Bogor)			4,728,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	1.0 THN	4,086,000	4,086,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	321,000	321,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	321,000	321,000	
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.023-Bogor)			945,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PPPK	1.0 THN	815,000	815,000	
	- Belanja Tunj. Anak PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	65,000	65,000	
	- Belanja Tunj. Anak PPPK (gaji ke 14)	1.0 BLN	65,000	65,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORG (09) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
UNIT KERJA (237242) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
ALOKASI Rp. 13,377,417,000

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.023-Bogor) - Belanja Tunj. Fungsional PPPK - Belanja Tunj. Fungsional PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Fungsional PPPK (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	13,338,000 1,080,000 1,080,000	15,498,000 13,338,000 1,080,000 1,080,000	RM
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.023-Bogor) - Belanja Tunj. Beras PPPK	1.0 THN	4,261,000	4,261,000	RM
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.023-Bogor) - Belanja Uang Makan PPPK	1.0 THN	19,536,000	19,536,000	RM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			6,354,672,000	U
A	<i>Kebutuhan Sehari Hari Perkantoran</i>			<i>2,310,588,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.023-Bogor) - Biaya honor ke-13 Tenaga Pelaksana Kontrak - Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran - Biaya Langganan Internet - Biaya Tenaga Pengaman Kantor - Biaya Tenaga Pengemudi - Biaya Tenaga Pekarya Kebun - Biaya pembantu lapang (upah kebun) - Biaya Penerimaan Tamu - Biaya Makanan Kecil (Konsumsi Rapat) - Biaya lisensi aplikasi untuk penyelenggaraan rapat secara online/video conference	47.0 OB 102.0 OT 12.0 BULAN 214.0 OB 136.0 OB 150.0 OB 1570.0 OH 12.0 BULAN 270.0 OK 12.0 BULAN	3,436,000 1,500,000 11,000,000 3,372,000 3,191,000 2,933,000 80,000 7,800,000 20,000 2,650,000	161,492,000 153,000,000 132,000,000 721,608,000 433,976,000 439,950,000 125,600,000 93,600,000 5,400,000 31,800,000	RM
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.023-Bogor) - Biaya Pembelian Porto dan Pengiriman Surat Dinas	1.0 TAHUN	12,162,000	12,162,000	RM
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>811,512,000</i>	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.023-Bogor) - Langganan Listrik	12.0 BULAN	65,950,000	791,400,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.023-Bogor) - Langganan Telepon	12.0 BULAN	96,000	1,152,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.023-Bogor) - Langganan Air	12.0 BULAN	1,580,000	18,960,000	RM
C	<i>Pemeliharaan Kantor</i>			<i>2,563,192,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORG (09) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
UNIT KERJA (237242) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
ALOKASI Rp. 13,377,417,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.023-Bogor) - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Jawa Barat) - Perawatan Halaman Kantor - Perawatan Gudang Arsip - Perawatan Taman/Kebun - Perawatan jalan dan pagar kantor - Perawatan Drainase - Perawatan Dinding (Pengecatan)	6381.0 M2/TH 4000.0 M2/TH 572.0 M2/TH 10000.0 M2/TH 10076.0 M2/TH 2.0 PAKET 2.0 PAKET	178,000 11,000 141,000 11,000 11,000 18,693,000 39,803,000	1,598,298,000 1,135,818,000 44,000,000 80,652,000 110,000,000 110,836,000 37,386,000 79,606,000	RM
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.023-Bogor) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Jawa Barat) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 3 (Jawa Barat) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II (Jawa Barat) - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Jawa Barat) - Biaya pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Double Gardan (Jawa Barat) - Perawatan/pemeliharaan komputer/notebook - Perawatan/pemeliharaan Printer/Plotter - Pemeliharaan AC Split - Pemeliharaan Inventaris Kantor - Perawatan Jaringan Listrik/Gardu Listrik - Perawatan Jaringan Air - Perawatan Jaringan Telepon/Internet - Pemeliharaan Genset 250 KVA <i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i> <u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u>	9.0 UNIT 2.0 Unit 1.0 UNIT 12.0 UNIT 1.0 UNIT 50.0 UNIT 20.0 UNIT 80.0 UNIT 53.0 OT 5.0 PAKET 1.0 PAKET 2.0 PAKET 1.0 UNIT	4,880,000 4,880,000 42,090,000 36,690,000 39,340,000 730,000 690,000 610,000 2,000,000 20,000,000 37,614,000 15,000,000 16,790,000	43,920,000 9,760,000 42,090,000 440,280,000 39,340,000 36,500,000 13,800,000 48,800,000 106,000,000 100,000,000 37,614,000 30,000,000 16,790,000	RM
D	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.023-Bogor)			669,380,000	
521115	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) - Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana s.d. Rp.100 juta) - Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana s.d. Rp.100 juta) - Honorarium Penanggung Jawab dan Koordinator SAI - Honorarium Ketua, Wakil Ketua dan Anggota SAI - Honorarium Pengurus/Penyimpanan Barang Milik Negara Tingkat Kuasa Pengguna Barang	12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 36.0 OB 12.0 OB 36.0 OB 24.0 OB 48.0 OB 24.0 OB	1,800,000 1,750,000 750,000 660,000 490,000 155,000 100,000 200,000 150,000 180,000	21,600,000 21,000,000 9,000,000 7,920,000 17,640,000 1,860,000 3,600,000 4,800,000 7,200,000 4,320,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORG (09) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
UNIT KERJA (237242) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
ALOKASI Rp. 13,377,417,000

Halaman : 11

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.023-Bogor) - Biaya Sertifikasi LsPro - Biaya Pemeliharaan Kesehatan Pegawai - Biaya Pembelian saprodi (pupuk, benih/bibit, pestisida, dll) - Biaya Medical CheckUp - Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Jawa Barat) - Pakaian Kerja Satpam (Jawa Barat) - Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh (Jawa Barat) - Pakaian Outsourcing - Admin Cash Manajemen System	2.0 Paket 12.0 BULAN 4.0 Paket 110.0 ORANG 110.0 STEL 16.0 STEL 50.0 STEL 6.0 STEL 12.0 BULAN	17,500,000 15,890,000 10,000,000 1,500,000 700,000 1,300,000 595,000 575,000 50,000	562,280,000 35,000,000 190,680,000 40,000,000 165,000,000 77,000,000 20,800,000 29,750,000 3,450,000 600,000	RM
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.023-Bogor) - Honorarium Pejabat Pengadaan	12.0 OB	680,000	8,160,000	RM
6918.EBD	<u>Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]</u>	1.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		86,500,000	
6918.EBD.953	Lokasi : KOTA BOGOR <u>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</u>	1.0 Dokumen		86,500,000	
051	<u>Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi</u>			86,500,000	U
A	<i>Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi</i>			74,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.023-Bogor) - Fotocopi, penjiilidan dan penggandaan naskah - Konsumsi rapat	1.0 PAKET 50.0 OK	1,000,000 20,000	2,000,000 1,000,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.023-Bogor) - ATK dan bahan komputer	3.0 PAKET	2,500,000	7,500,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.023-Bogor) - Blokir perjadin - Transport Jakarta - Uang Harian perjalanan dinas Jakarta - Uang Harian perjalanan dinas - Transport - Penginapan	1.0 Paket 2.0 OK 3.0 OH 54.0 OH 20.0 OK 23.0 OH	31,500,000 200,000 300,000 400,000 300,000 200,000	31,500,000 400,000 900,000 21,600,000 6,000,000 4,600,000	2 *
B	<i>Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Resiko</i>			12,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.023-Bogor) - Fotocopi, penjiilidan dan penggandaan naskah - Konsumsi rapat	1.0 PAKET 175.0 OK	1,000,000 20,000	1,000,000 3,500,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(018)
(09)
(237242)
Rp. 13,377,417,000

KEMENTERIAN PERTANIAN
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.023-Bogor) - ATK dan bahan komputer	1.0 PAKET	2,500,000	2,500,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.023-Bogor) - Blokir perjadin - Uang Harian perjalanan dinas - Transport	1.0 Paket 5.0 OH 5.0 OK	1,500,000 400,000 300,000	5,000,000 1,500,000 2,000,000 1,500,000	2 *

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 **KEMENTERIAN PERTANIAN**
ESELON I : 09 **BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**
WILAYAH/PROVINSI : 0200 **JAWA BARAT**
SATUAN KERJA : 237242 **BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 23/01/26 2:18 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	0	7,864,025	0	7,864,025	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	5,213,000	0	5,213,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8,250,000	8,362,000	0	8,362,000	101.36
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	1,452,000	0	1,452,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	8,250,000	22,891,025	0	22,891,025	277.47
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	55,000,000	495,698,000	0	495,698,000	901.27
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	0	2,000,000	0	2,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	55,000,000	497,698,000	0	497,698,000	904.91
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	386,424	0	386,424	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	386,424	0	386,424	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	16,189,100	0	16,189,100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	16,189,100	0	16,189,100	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	63,250,000	537,164,549	0	537,164,549	849.27
	JUMLAH PENDAPATAN	63,250,000	537,164,549	0	537,164,549	849.27

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 237242
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA BARAT
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 23/01/26 2:17 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 23/1/26 8:48 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,475,002,000	2,595,475,000	2,580,099,660	0	2,580,099,660	99.41	15,375,340
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	40,000	41,000	37,911	302	37,609	91.73	3,391
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	175,480,000	193,154,000	189,718,712	0	189,718,712	98.22	3,435,288
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	32,718,000	35,883,000	35,706,997	0	35,706,997	99.51	176,003
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	43,122,000	43,122,000	42,070,000	0	42,070,000	97.56	1,052,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	232,943,000	274,463,000	266,766,000	0	266,766,000	97.2	7,697,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4,405,000	28,711,000	26,670,967	0	26,670,967	92.89	2,040,033
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	119,064,000	124,585,000	124,562,400	0	124,562,400	99.98	22,600
511129	Belanja Uang Makan PNS	468,709,000	336,370,000	316,082,000	0	316,082,000	93.97	20,288,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	45,383,000	49,500,000	46,965,000	1,845,100	45,119,900	91.15	4,380,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,596,866,000	3,681,304,000	3,628,679,647	1,845,402	3,626,834,245	98.52	54,469,755
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	91,943,000	91,943,000	90,104,000	0	90,104,000	98	1,839,000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,000	4,000	1,530	0	1,530	38.25	2,470
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,728,000	4,728,000	4,505,200	0	4,505,200	95.29	222,800
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	945,000	945,000	901,040	0	901,040	95.35	43,960
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15,498,000	15,498,000	15,120,000	0	15,120,000	97.56	378,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,261,000	4,261,000	4,055,520	0	4,055,520	95.18	205,480
511628	Belanja Uang Makan PPPK	19,536,000	19,536,000	13,838,000	0	13,838,000	70.83	5,698,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	136,915,000	136,915,000	128,525,290	0	128,525,290	93.87	8,389,710
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	3,733,781,000	3,818,219,000	3,757,204,937	1,845,402	3,755,359,535	98.35	62,859,465
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,682,000,000	2,298,426,000	2,232,463,043	0	2,232,463,043	97.13	65,962,957
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,162,000	12,162,000	12,110,000	0	12,110,000	99.57	52,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	98,940,000	98,940,000	98,940,000	0	98,940,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	453,440,000	562,280,000	559,924,676	0	559,924,676	99.58	2,355,324
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,246,542,000	2,971,808,000	2,903,437,719	0	2,903,437,719	97.7	68,370,281
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	31,500,000	103,740,000	102,661,050	0	102,661,050	98.96	1,078,950
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,160,000	8,160,000	8,160,000	0	8,160,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	25,000,000	331,826,000	326,294,900	0	326,294,900	98.33	5,531,100

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 237242
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA BARAT
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 23/01/26 2:17 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 23/1/26 8:48 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	64,660,000	443,726,000	437,115,950	0	437,115,950	98.51	6,610,050
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	43,500,000	351,180,000	348,975,846	0	348,975,846	99.37	2,204,154
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	43,500,000	351,180,000	348,975,846	0	348,975,846	99.37	2,204,154
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,421,712,000	791,400,000	759,115,230	0	759,115,230	95.92	32,284,770
522112	Belanja Langganan Telepon	12,000,000	1,152,000	1,146,852	0	1,146,852	99.55	5,148
522113	Belanja Langganan Air	72,000,000	18,960,000	16,856,700	0	16,856,700	88.91	2,103,300
522141	Belanja Sewa	0	136,950,000	132,146,000	0	132,146,000	96.49	4,804,000
522151	Belanja Jasa Profesi	5,000,000	48,900,000	47,700,000	0	47,700,000	97.55	1,200,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,510,712,000	997,362,000	956,964,782	0	956,964,782	95.95	40,397,218
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,481,306,000	1,598,298,000	1,597,416,439	0	1,597,416,439	99.94	881,561
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	120,000,000	0	0	0	0		0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,002,280,000	964,894,000	964,503,895	0	964,503,895	99.96	390,105
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,603,586,000	2,563,192,000	2,561,920,334	0	2,561,920,334	99.95	1,271,666
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	405,000,000	2,145,181,000	1,725,280,228	0	1,725,280,228	80.43	419,900,772
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	46,600,000	21,100,000	0	21,100,000	45.28	25,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	405,000,000	2,191,781,000	1,746,380,228	0	1,746,380,228	79.68	445,400,772
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	7,874,000,000	9,519,049,000	8,954,794,859	0	8,954,794,859	94.07	564,254,141
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48,460,000	40,149,000	40,140,001	0	40,140,001	99.98	8,999
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	48,460,000	40,149,000	40,140,001	0	40,140,001	99.98	8,999
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	48,460,000	40,149,000	40,140,001	0	40,140,001	99.98	8,999
	JUMLAH BELANJA	11,656,241,000	13,377,417,000	12,752,139,797	1,845,402	12,750,294,395	95.31	627,122,605

BALAI BESAR PERAKATAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
PER : 27-Nov-2025

No	NIP	Nama	Jetua	Jenis Kelamin	Pendidikan Akhir	Nama Sekolah/Universitas	Tahun Lulus	Pekerjaan	Program Studi	IPK	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional Umum	Jabatan Fungsional Tertentu	TMT Fungsional Tertentu	TMT Jabatan	Fungsional Pegawai Saat Ini	Golongan Pegawai Saat Ini	TMT Golongan Saat Ini	Masa Kerja Kineslabahan
1	19947132025051003	ADE JULYADIEN NASHRULLAH, SE		L	S1	STE INDOCAKTI MALANG	2017			3,2			ANALIS STANDARISASI AHLI PERTAMA	01/05/2025	01/05/2025	PENATA MUDA	IV/a	01/03/2025	0 tahun, 6 bulan
2	19968112002031001	ADIB HASANAWI, S.S., MT		L	S2	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	2021			Cum laude			ANALIS STANDARISASI AHLI PERTAMA	09/01/2024	09/01/2024	PENATA MUDA TK I	IV/b	01/03/2022	4 tahun, 8 bulan
3	1996803200031001	AGUS SUDIANA		L	SLTA	SMEA NEGERI BOGOR	1988			00,00		PENELAAH TEKNIK KEBIAKARAN	02/01/2024	02/01/2024	PENATA MUDA TK I	IV/b	01/04/2020	29 tahun, 7 bulan	
4	1994026201902001	AINUR ROHMAH, SP		P	S1	UNIVERSITAS BRAVIKAWA	2016			05,32		PENELAAH TEKNIK KEBIAKARAN	02/01/2024	02/01/2024	PENATA MUDA TK I	IV/b	01/04/2023	6 tahun, 9 bulan	
5	19930506203211007	ANDRIYAN PRYATNIA, S.Ikom		L	S1	UNIVERSITAS PAKJANJAN	2016			03,06			PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	01/12/2023	01/12/2023	IV/b	IV/b	12/01/2023	2 tahun, 10 bulan
6	19940132009121003	ANGRI HERIYANI, SP, M. Sc.	KETUA KELOMPOK	L	S2	CUTNTH UNIVERSITY AUSTRALIA	2019						ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI MUDA	23/08/2022	23/08/2022	PENATA	IV/c	01/04/2019	15 tahun, 11 bulan
7	19760252006042025	ANIK DWI HASTUTI, S.P., M.M		P	S2	UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES LOS B	2005			05,52	KEPALA BAGIAN TATA USAHA			05/05/2023	05/05/2023	PEMBINA	IV/a	01/04/2022	19 tahun, 7 bulan
8	19930409207101001	ARI SUSANTO		L	SLTA	NEGERI 1 GEMOLONG	2000			00,00			PENOLAH DATA DAN INFORMASI	02/01/2024	02/01/2024	PENATA MUDA	IV/b	01/10/2023	24 tahun, 7 bulan
9	198203082009101002	ARIS DWI SAPUTRA, SE	KETUA TM	L	S1	UNIVERSITAS SEBELAS MARET	2005			01,44			ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA	30/12/2020	30/12/2020	PENATA TK I	IV/d	01/10/2022	16 tahun, 1 bulan
10	199321220202101004	ASBAR SUMANTRI, A.Md.Kom.		L	D3	Universitas Bina Sarana Informatika	2019			01,41	KEPALA BALAI BESAR PERAKATAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN		PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	28/02/2025	28/02/2025	PENGATUR TK I	IV/d	01/12/2024	11 tahun, 11 bulan
11	197801012002121006	ASDIANTO, S.P., M.T		L	S2	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	2014			01,38					02/05/2025	PEMBINA UTAMA MUDA	N/C	01/10/2025	22 tahun, 11 bulan
12	197307162006041023	BUDI SANTOSO		L	SLTA	SMEA	1999			00,00			PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	02/01/2024	02/01/2024	PENATA MUDA	IV/a	01/04/2022	27 tahun, 4 bulan
13	1983110502013011001	CATUR NERUSMANO, S.Kom.	KETUA TM	L	S1	Universitas Komputer Indonesia	2005			01,15			ANALIS STANDARISASI AHLI PERTAMA	28/02/2025	28/02/2025	PENATA TK I	IV/d	01/04/2023	24 tahun, 10 bulan
14	197206122007012001	DWI WAHYUNINGSIH		P	SLTA	KERTONEGORO	1995			00,00			PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	02/01/2024	02/01/2024	PENATA MUDA	IV/a	01/04/2023	26 tahun, 7 bulan
15	200111382030502008	ELINNA DANNINGSWARI, S.T.P.		P	S1	UNIVERSITAS GADJAH MADA	2016			05,42			ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMA	01/05/2025	01/05/2025	PENATA MUDA	IV/a	01/05/2025	0 tahun, 6 bulan
16	198801050214031004	ESTYANTO SRI NUGROHO, S.P., M.Sc.	KETUA TM	L	S2	Universitas Gadjah Mada	2024			0,180555556			ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMA	14/04/2025	14/04/2025	PENATA	IV/c	01/10/2022	11 tahun, 8 bulan
17	199502152020202001	FERDIANA AYU CAHYANINGSITYAS, A.Md.		P	D3	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	2015			0,519166667			PENELAAH TEKNIK KEBIAKARAN	02/01/2024	02/01/2024	PENGATUR	IV/c	01/03/2022	7 tahun, 8 bulan
18	199710320203021001	FIKA HIDAYAH, A.Md.P.		P	D3	UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN	2019			06,05			TEKNIISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN TERAMPIL	13/11/2023	13/11/2023	PENGATUR	IV/c	01/03/2022	7 tahun, 8 bulan
19	198008022008122001	FITRI WIDIASUTJI, A.Md.		P	D3	UNIVERSITAS GADJAH MADA	2002			01,29			TEKNIISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN PENYELIA	20/12/2019	20/12/2019	PENATA	IV/c	01/04/2021	20 tahun, 7 bulan
20	199302219202031001	FRANCISCUS BENHARDI WASTUWIDYA, S.T.P., M.T.		L	S2	UNIVERSITAS INDONESIA	2020			01,48			ANALIS STANDARISASI AHLI PERTAMA	09/01/2024	09/01/2024	PENATA MUDA TK I	IV/b	01/03/2022	4 tahun, 8 bulan
21	19940122008011001	GIARA NANNI NANGA, S.Si., MSc	KETUA TM	L	S2	UNIVERSITAS GADJAH MADA	2014						ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMA	30/07/2024	30/07/2024	PENATA MUDA TK I	IV/b	01/10/2022	7 tahun, 10 bulan
22	197905302003001003	GRIES MOULANA PRIGANI, S. Rom	KETUA TM	P	S1	UNIVERSITAS GUNANDA	2014						ARSPARIS AHLI PERTAMA	17/09/2018	17/09/2018	PENATA MUDA TK I	IV/b	01/10/2023	23 tahun, 10 bulan
23	198711082019021001	GUNAWAN BAYU WICAKSONO, A.Md.		L	D3	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	2008			01,21			TEKNIISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN TERAMPIL	24/01/2021	01/05/2021	PENGATUR TK I	IV/d	01/04/2024	9 tahun, 9 bulan
24	199003020201211002	HAFIDHI ADI NUGROHO, A.Md.		L	D3	UNIVERSITAS SEBELAS MARET	2011			01,50			TEKNIISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN TERAMPIL	06/06/2023	04/05/2023	PENGATUR	IV/c	01/12/2020	8 tahun, 11 bulan
25	19880627006042008	HARYANI, SE		P	S1	UNIVERSITAS IBN KHALDUN	2015			05,43			PRANATA KEUANGAN APBN MAHIR	01/04/2021	20/04/2021	PENATA MUDA TK I	IV/b	01/10/2022	24 tahun, 6 bulan
26	1974030200501001	IBRAHIM ADAMU SIPAHUTAR, SP., M.Sc	KETUA KELOMPOK	L	S2	SHIRMANE UNIVERSITY	2016						ANALIS STANDARISASI AHLI MUDA	02/01/2024	23/08/2022	PENATA TK I	IV/d	01/04/2019	20 tahun, 10 bulan
27	197403072006041009	IMAN KURNIA SAFARIAN, S.P	KETUA TM	L	S1	Sekolah Tinggi Pertanian Bale Bandu	2004			01,34			ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA	22/05/2025	22/05/2025	PEMBINA	N/A	01/08/2025	24 tahun, 7 bulan
28	198012172003121001	KUSRIANDI		L	SLTA	S3 ASIA AFRIKA	2001						PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	02/01/2024	02/01/2024	PENATA MUDA TK I	IV/b	01/04/2024	22 tahun, 11 bulan
29	198406202019022002	LAELATUL QODARIYANI, S.Kom		P	S1	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI ADSUTIPT	2009			0,136805556			PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	31/01/2021	31/01/2021	PENATA MUDA TK I	IV/b	01/10/2025	6 tahun, 9 bulan
30	199404082020302001	LARA DEWI WAHYUNI, S.AP.		P	S1	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDUNG	2016			01,54			ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	04/01/2024	04/01/2024	PENATA MUDA	IV/a	01/03/2022	4 tahun, 8 bulan
31	197502072007012001	LIA AMALIA, A.Md.		P	D3	GUNADARMA	1996			00,00			TEKNIISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN MAHIR	01/02/2017	01/02/2017	PENATA MUDA TK I	IV/b	01/10/2021	22 tahun, 7 bulan
32	19900109202121004	MARLINA, SP.		P	S1	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	2012						PERENCANA AHLI PERTAMA	01/12/2023	01/12/2023	IV/b	IV/b	12/03/2023	2 tahun, 10 bulan
33	197304161999032002	Dr. MAULIA ARIES SUSANTI, S.P., M.Sc	KETUA TM	P	S3	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	2015			3,82			PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	02/01/2024	30/12/2020	PEMBINA	IV/a	01/10/2020	26 tahun, 8 bulan
34	19970307200122003	METI MARIYANTI, S.P		P	S1	UNIVERSITAS PADJADJARAN	2019			0,173611111			PENELAAH TEKNIK KEBIAKARAN (PETUGAS BELAJAR SV/S2)	01/08/2025	01/08/2025	PENATA MUDA TK I	IV/b	01/12/2024	4 tahun, 11 bulan
35	1983091320020121002	MUFTI WIRAHADINATA, A.Md.		L	D3	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	2006			0,143055556			PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	06/06/2023	06/06/2023	PENGATUR	IV/c	01/12/2020	18 tahun, 0 bulan
36	1995101020202032001	NAILA HUSNUL KHOTIMAH, A.Md.Si.		P	D3	Politeknik AKA Bogor	2016			2,82			TEKNIISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN TERAMPIL	09/01/2024	13/11/2023	PENGATUR	IV/c	01/03/2022	7 tahun, 8 bulan
37	199706030202031001	MANDA PRATAMA DAMKA, A.Md.Si.		L	D3	POLITEKNIK AKA BOGOR	2018			05,49				09/01/2024	13/11/2023	PENGATUR	IV/c	01/03/2022	7 tahun, 8 bulan
38	199707072020203001	NAUVAL QOSSINA ALIFRA, A.Md.		P	D3	Institut Pertanian Bogor	2019			3,53			PENELAAH TEKNIK KEBIAKARAN	02/01/2024	02/01/2024	PENGATUR	IV/c	01/03/2022	4 tahun, 9 bulan
39	1983042620091211002	NURDIYANTO AGUNG PRASETYO, ST, M.Sc		L	S2	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	2015			05,55			PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	02/01/2024	02/01/2024	PENATA TK I	IV/b	01/04/2025	17 tahun, 11 bulan
40	198908262020301001	NURMANI, A.Md.Kom.		P	D3	STMIK MECUSUJAN	2017			05,05			PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	02/01/2024	02/01/2024	PENGATUR	IV/c	01/03/2022	7 tahun, 8 bulan
41	19960501202031001	OKA PRADITHA PRIYANGGA, S.T., M.T.		L	S2	INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	2021			0,130972222			ANALIS STANDARISASI AHLI PERTAMA	08/01/2024	09/01/2024	PENATA MUDA TK I	IV/b	01/03/2022	4 tahun, 8 bulan
42	199008102009101001	P. YOFI YOGAWANA		L	SLTA	KOSGORO	2004			00,00			PENGADMINISTRASI PERANTORIAN	02/01/2024	02/01/2024	PENATA MUDA	IV/a	01/10/2025	20 tahun, 10 bulan
43	196710071994012009	Dr. P. RAHMAMATI, S.Md		P	S3	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	2017			0,170813333			PERENCANA AHLI MADYA	18/07/2024	18/07/2024	PEMBINA UTAMA MUDA	N/C	01/10/2023	31 tahun, 8 bulan
44	198801072014032001	RATRI ARIANI, SP	KETUA TM	P	S1	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	2011			0,1375			ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN AHLI PERTAMA	02/01/2024	23/08/2022	PENATA MUDA TK I	IV/b	01/04/2018	11 tahun, 8 bulan
45	199404211998111001	R. WIDUKO SUBANDONO, M.Sc		L	S2	UNIV-OF THE PHILIPPINES	2005			00,00			PENELAAH TEKNIK KEBIAKARAN	02/01/2024	02/01/2024	PEMBINA	IV/a	01/04/2023	33 tahun, 7 bulan
46	197611182011011001	SETYO PURWANTO, SP., M.Sc.	KETUA TM	L	S2	National Chung Hsing University	2021			00,00			ANALIS STANDARISASI AHLI PERTAMA	23/08/2022	23/08/2022	PENATA MUDA TK I	IV/b	01/04/2021	14 tahun, 10 bulan
47	199302382001211002	TEGUH MULYONO, SM		L	S1	STIE PELITA BANGSA	2018			01,58			ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	30/07/2024	30/07/2024	PENATA MUDA TK I	IV/b	01/06/2025	1 tahun, 5 bulan
48	1997111920020121001	TULUS ARIZON PRATAMA SIMANULLANG, A.Md.		L	D3	Politeknik Teknologi Kimia Industri	2018			01,34			TEKNIISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN TERAMPIL	06/06/2023	06/06/2023	PENGATUR TK I	IV/d	01/08/2025	7 tahun, 11 bulan
49	199603032019022002	YANUAR RYAN IRRAWAN, A.Md		L	D3	UNIVERSITAS GADJAH MADA	2017			05,51			TEKNIISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN TERAMPIL	24/05/2021	01/05/2021	PENGATUR TK I	IV/d	01/04/2024	9 tahun, 9 bulan
50	198906062025052006	YOLA SEPTIANA DEWIL, S.Ikom		P	S1	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TRITAYASA	2020			3,83			PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	01/05/2025	01/05/2025	PENATA MUDA	IV/a	01/05/2025	0 tahun, 6 bulan

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan;
Periode Desember 2025

Kementerian : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
Unit Organisasi 09 BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
Satuan Kerja : 237242 Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	12,940,917,000	0	10,439,031,253	2,313,108,544	12,752,139,797	98.54 %	188,777,203
EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1,424,526,000	0	40,140,001	1,374,710,671	1,414,850,672	99.32 %	9,675,328
EC.7911 Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	1,424,526,000	0	40,140,001	1,374,710,671	1,414,850,672	99.32 %	9,675,328
WA Program Dukungan Manajemen	11,516,391,000	0	10,398,891,252	938,397,873	11,337,289,125	98.44 %	179,101,875
WA.6918 Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	11,516,391,000	0	10,398,891,252	938,397,873	11,337,289,125	98.44 %	179,101,875

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO

periode : DESEMBER satker : 237242

No	Satker	Nama Satker	BAES1	Periode	Program	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)						GAP**	Kode Ket	PN	Keterangan	Terkonfirmasi	Validasi	Catatan	Tanggal Rekam Di Sakti	Tanggal Kirim Di Sakti	Action			
									Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini										Catatan	Validasi		
														RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO												TPCRO (%)	PCRO (%)
1	237242	BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN	01809	12	EC	7911	BJA107	Laporan Hasil Uji Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	1,384,377,000	1,374,710,671	99.30	3	Produk	2.00	65.00	65.00	3.0000	3.00	100.00	0.70	00	Non PN	TPCRO dan TRVRO tahun 2025 tercapai 100%		00 - Data Valid		02-JAN-26	02-JAN-26	Lihat catatan	-
2	237242	BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN	01809	12	EC	7911	CAG104	Sarana Laboratorium SDLP Modern	40,149,000	40,140,001	99.98	7	Unit	0.00	0.00	0.00	7.0000	7.00	100.00	0.02	00	Non PN	TPCRO dan TRVRO tahun 2025 tercapai 100%		00 - Data Valid		02-JAN-26	02-JAN-26	Lihat catatan	-
3	237242	BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN	01809	12	WA	6918	AEA101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1,195,000,000	870,515,805	72.85	1	kegiatan	1.00	20.00	19.52	1.0000	1.00	100.00	27.15	01	Non PN	TPCRO dan TRVRO tahun 2025 tercapai 100% Terdapat pagu blokir sebesar Rp315.000.000		00 - Data Valid		02-JAN-26	02-JAN-26	Lihat catatan	-
4	237242	BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN	01809	12	WA	6918	EBA956	Layanan BMN	10,000,000	8,458,000	84.58	1	Layanan	1.00	8.37	8.37	1.0000	1.00	100.00	15.42	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui terdapat pagu blokir sebesar Rp1.500.000		00 - Data Valid		02-JAN-26	02-JAN-26	Lihat catatan	-
5	237242	BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN	01809	12	WA	6918	EBA958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	74,000,000	40,170,700	54.28	1	Layanan	1.00	25.00	25.00	1.0000	1.00	100.00	45.72	01	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Terdapat pagu blokir sebesar Rp33.000.000		00 - Data Valid		02-JAN-26	02-JAN-26	Lihat catatan	-
6	237242	BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN	01809	12	WA	6918	EBA962	Layanan Umum	414,500,000	357,867,748	86.34	1	Layanan	1.00	8.37	8.37	1.0000	1.00	100.00	13.66	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui terdapat pagu blokir sebesar Rp54.000.000		00 - Data Valid		02-JAN-26	02-JAN-26	Lihat catatan	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

7	237242	BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN	01809	12	WA	6918	EBA994	Layanan Perkantoran	10,172,891,000	10,007,841,772	98.38	1	Layanan	1.00	8.37	8.37	1.0000	1.00	100.00	1.62	00	Non PN	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui	00 - Data Valid		02-JAN-26	02-JAN-26	Lihat catatan	-
8	237242	BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN	01809	12	WA	6918	EBD953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	86,500,000	52,435,100	60.62	1	Dokumen	1.00	30.00	30.00	1.0000	1.00	100.00	39.38	01	Non PN	TPCRO dan TRVRO tahun 2025 tercapai 100% Terdapat pagu blokir sebesar Rp33.000.000	00 - Data Valid		02-JAN-26	02-JAN-26	Lihat catatan	-

Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Desember tahun 2025, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 650172372421000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 1.268.795.776,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00517/SSP/237242/2025

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	1.268.795.776,00
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
3	Saldo BP BPP	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	1.268.795.776,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	0,00
2	Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0,00
4	Saldo Pajak	Rp.	0,00
5	Saldo Hibah	Rp.	1.268.795.776,00
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	1.268.795.776,00

C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0,00
----	---------------------------	-----	------

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	1.268.795.776,00
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	1.268.795.776,00

B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0,00
----	----------------------------	-----	------

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0,00
2	a. Saldo TUP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00

	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0,00
--	----------------------------------	-----	------

3	Saldo Lainnya	Rp.	1.268.795.776,00
---	---------------	-----	------------------

4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	1.268.795.776,00
---	-------------------	-----	------------------

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	0,00
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0,00
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	1.268.795.776,00

4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	1.268.795.776,00
---	-------------------	-----	------------------

C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0,00
----	---	-----	------

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

0,00 karena Tidak ada selisih Kas

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0,00 karena Tidak ada selisih Pembukuan Kas

C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)

0,00 karena Tidak ada selisih Pembukuan TUP

D. Selisih Pembukuan Lainnya (III.C)

0,00 karena Tidak ada selisih Pembukuan lainnya

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



HARYANI, SE
NIP 196806272006042008

Mengetahui
Kepala Pengguna Anggaran



ASDIANTO, S.P., M.T
NIP 197801012002121006

Dicetak pada tanggal, 05 Januari 2026

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Provinsi/Kabupaten/Kota : (02.52) JAWA BARAT / KOTA BOGOR

Satuan Kerja : (237242) BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

Alamat dan No Telp : Jalan Tentara Pelajar No. 12, Cimanggu, Bogor , 02518323011

Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-018.09.2.237242/2025

Tahun : 2025

KPPN : (023) Bogor

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 1.268.795.776,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00517/SSP/237242/2025

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	2.784.591.926,00	2.738.487.631,00	4.254.283.781,00	1.268.795.776,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	1.115.870.381,00	2.738.487.631,00	2.585.562.236,00	1.268.795.776,00
	2. BP UM (Voucher)	1.668.721.545,00	0,00	1.668.721.545,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	2.784.591.926,00	853.753.685,00	2.369.549.835,00	1.268.795.776,00
	1. BP UP*)	66.000.000,00	103.832.320,00	169.832.320,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	244.398.550,00	244.398.550,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	269.246.094,00	269.246.094,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	24.989.221,00	24.989.221,00	0,00
	5. BP Hibah	2.643.506.447,00	0,00	1.374.710.671,00	1.268.795.776,00
	6. BP Lain-lain	75.085.479,00	211.287.500,00	286.372.979,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	1.268.795.776,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	1.268.795.776,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	1.268.795.776,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	1.268.795.776,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	1.268.795.776,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	1.268.795.776,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00 karena Tidak ada selisih Kas
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00 karena Tidak ada selisih Pembukuan Kas
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00 karena Tidak ada selisih Pembukuan TUP
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00 karena Tidak ada selisih Pembukuan lainnya

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

KOTA BOGOR, Desember 2025

Bendahara Pengeluaran



HARYANI, SE

NIP 196806272006042008

Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Desember tahun 2025, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 650172372421000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 1.268.795.776,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00517/SSP/237242/2025

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	1.268.795.776,00
2	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
3	Saldo BP BPP	Rp.	0,00
4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	1.268.795.776,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1	Saldo BP UP	Rp.	0,00
2	Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3	Saldo LS-Bendahara	Rp.	0,00
4	Saldo Pajak	Rp.	0,00
5	Saldo Hibah	Rp.	1.268.795.776,00
6	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
7	Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	1.268.795.776,00

C.	Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0,00
----	---------------------------	-----	------

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1	Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2	Uang di Rekening Bendahara	Rp.	1.268.795.776,00
3	Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	1.268.795.776,00

B.	Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)	Rp.	0,00
----	----------------------------	-----	------

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1	a. Saldo UP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0,00
2	a. Saldo TUP	Rp.	0,00
	b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00

	c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0,00
--	----------------------------------	-----	------

3	Saldo Lainnya	Rp.	1.268.795.776,00
---	---------------	-----	------------------

4	Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	1.268.795.776,00
---	-------------------	-----	------------------

B. Pembukuan menurut UAKPA

1	Kas UP di Bendahara	Rp.	0,00
2	Kas TUP di Bendahara	Rp.	0,00
3	Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	1.268.795.776,00

4	Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	1.268.795.776,00
---	-------------------	-----	------------------

C.	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0,00
----	---	-----	------

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

0,00 karena Tidak ada selisih Kas

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

0,00 karena Tidak ada selisih Pembukuan Kas

C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)

0,00 karena Tidak ada selisih Pembukuan TUP

D. Selisih Pembukuan Lainnya (III.C)

0,00 karena Tidak ada selisih Pembukuan lainnya

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



HARYANI, SE
NIP 196806272006042008

Mengetahui
Kepala Pengguna Anggaran



ASDIANTO, S.P., M.T
NIP 197801012002121006

Dicetak pada tanggal, 05 Januari 2026



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12, CIMANGGU, BOGOR 16114
TELEPON: (0251) 8323011 – 8323012, FAKSIMILI: (0251) 8311256
WEBSITE: sdlahan.brmp.pertanian.go.id

Nomor : B-127/KU.070/H.10/01/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Laporan Saldo Rekening
Periode Bulan Desember 2025

09 Januari 2026

Yth.
Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Bogor
di
Bogor

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor:182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga, bersama ini kami sampaikan Laporan Saldo Rekening Bendahara Pengeluaran, Rekening Hibah Langsung (RPL) dan Rekening Kerjasama (Kemitraan) yang dikelola Satuan Kerja Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, periode bulan Desember 2025, sebagai berikut (Laporan Saldo Terlampir):

1. RPL 140 PDHL BBSDLP UNTUK 2W2H8PDA (ACIAR) Nomor Rekening: 0012-01-004016-30-1
2. RPL 140 PDHL BBSDLP UNTUK 2227WN8A (AFACI) Nomor Rekening: 0012-01-004790-30-3
3. RPL 140 PDHL BBSDLP UNTUK 2JL7VCNA (KOAT) Nomor Rekening: 0012-01-004887-30-4
4. RPL 023 KS BBPSI SDLP UTK SID RIAU Nomor Rekening: 0012-01-004917-30-3
5. RPL 023 KS BBPSISDLP SID OGAN ILIR Nomor Rekening: 0012-01-004931-30-7
6. RPL 023 KS BRMPDLP SID KOMERING Nomor Rekening: 0012-01-004940-30-6
7. RPL 023 KS BBPMSDLP UTK BPMP Nomor Rekening: 0012-01-004957-30-3
8. RPL 023 KS BBPMSDLP SID JAMBI Nomor Rekening: 0012-01-004958-30-9
9. Bendahara Pengeluaran (BPG 023 BALAI BPSI SDLP) Nomor Rekening: 6501-72-372421-00-0

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,



Asdianto, S.P., M.T

NIP. 197801012002121006

Tembusan:

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

PER 31 DESEMBER 2025[illegible]

Kementerian/Lembaga	: 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN	Jenis Piutang	: 1 - Perorangan
Eselon 1	: 018.09 - BADAN PERAKITAN DAN	Nomor Piutang	: 00002/AR/237242/2024
Wilayah	: 0200 - BPTP Jawa Barat	Kwalitasi Piutang	: L - Piutang Lancar
Satuan Kerja	: 237242 - BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN	Status Transaksi Piutang	: 1 - Piutang Baru
		Surat Penagihan	: -
		Tanggal Surat Penagihan	: 01/04/2024

KARTU PIUTANG

Dari tanggal : 01-04-2024 s/d 05-01-2026

Nama Debitur	: ANGGRi HERVANI, SP	Jumlah Piutang	: 31,500,000
KTP / NPWP	: 348141086507000	Tanggal Jatuh Tempo	: 30/04/2029
Alamat	: Pati	Angsuran	:
Piutang Atas	: 425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	Tanggal Mulai	: 01/04/2024
		Dasar Penetapan Piutang	
		SK	: B-776/PL.320/H.8/03/2024
		Tanggal SK	: 13/03/2024

Tanggal	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
01/04/2024	Piutang Baru - Pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan fungsional peneliti yang beralih kejabatan fungsional lainnya	31,500,000		31,500,000
20/05/2024	Settlement (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Fungsional periode April 2024)		525,000	30,975,000
20/05/2024	Settlement (Pengembalian Kelebihan Tunjangan Fungsional Periode Mei 2024)		525,000	30,450,000
28/06/2024	Koreksi (Koreksi Nilai Piutang Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional)		3,330,000	27,120,000
31/12/2024	Koreksi (Koreksi piutang atas piutang tahun 2024 yang tidak terbayarkan)	6,260,000		33,380,000
10/01/2025	Settlement (Pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan fungsional an Anggri Hervani)		1,050,000	32,330,000
22/01/2025	Settlement (Pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan fungsional an Anggri Hervani)		1,050,000	31,280,000
06/03/2025	Settlement (Pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan fungsional an anggri hervani)		1,575,000	29,705,000
09/07/2025	Settlement (Pembayaran Pengembalian Kelebihan Tunjangan Fungsional Ex Peneliti An. Anggri Hervani, SP)		1,000,000	28,705,000
28/08/2025	Settlement (Pengembalian kelebihan pembayaran tunjangan fungsional ex peneliti)		500,000	28,205,000
02/09/2025	Settlement (Pembayaran Pengembalian Kelembihan Tunjangan Funsguional Ex Peneliti AN. Anggri Hervani, SP.)		2,000,000	26,205,000
06/10/2025	Settlement (Pengembalian Tunjangan Fungsional yang beralih Jabatan ke JaFung Lainnya An. Anggri Hervani, SP.)		2,000,000	24,205,000
26/11/2025	Settlement (Pengembalian Tunjangan Ex Peneliti Yang Beralih Jabatan ke JabFung Lainnya An. Anggri Hervani)		2,000,000	22,205,000
22/12/2025	Settlement (Pengembalian Kelebihan Tunj Jafung Ex Peneliti Jafung Lainnya An. Anggri Hervani, SP.)		2,000,000	20,205,000

Direkam Oleh

Disetujui Oleh

BUDI SANTOSO
NIP.197207162006041023

ASDIANTO, S.P., M.T
NIP.197801012002121006

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
UAKPB : 237242 BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

Tgl Data : 23/01/26 6:35 AM
Tanggal : 23/01/26 2:13 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162121	Hak Cipta		19	5,175,000	0	0	0	0	19	5,175,000
8010101	ASET TAK BERWUJUD	null	19	5,175,000	0	0	0	0	19	5,175,000
162151	Software		67	3,012,687,229	0	0	0	0	67	3,012,687,229
8010101	ASET TAK BERWUJUD	null	67	3,012,687,229	0	0	0	0	67	3,012,687,229
162171	Hasil Kajian/Penelitian		249	24,710,591,864	0	0	0	0	249	24,710,591,864
8010101	ASET TAK BERWUJUD	null	249	24,710,591,864	0	0	0	0	249	24,710,591,864
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya		68	2,720,000	0	0	0	0	68	2,720,000
8010101	ASET TAK BERWUJUD	null	68	2,720,000	0	0	0	0	68	2,720,000
TOTAL				27,731,174,093		0		0		27,731,174,093

Bogor, 23 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

ASDIANTO, S.P., M.T
197801012002121006

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
UAKPB : 237242 BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

Tgl Data : 23/01/26 6:35 AM
Tanggal : 23/01/26 2:14 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		3,920	13,152,236,000	0	0	0	0	3,920	13,152,236,000
2010101	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	-	320	972,938,000	0	0	0	0	320	972,938,000
2010104	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	-	3,600	12,179,298,000	0	0	0	0	3,600	12,179,298,000
132111	Peralatan dan Mesin		2,149	22,323,508,159	7	40,140,001	0	0	2,156	22,363,648,160
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	-	2	666,134,000	0	0	0	0	2	666,134,000
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	-	12	2,309,773,475	0	0	0	0	12	2,309,773,475
3020103	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	-	2	45,677,520	0	0	0	0	2	45,677,520
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	-	9	185,847,000	0	0	0	0	9	185,847,000
3030205	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	-	1	3,520,000	0	0	0	0	1	3,520,000
3030301	ALAT UKUR UNIVERSAL	-	50	278,682,300	0	0	0	0	50	278,682,300
3030317	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	-	87	368,854,510	0	0	0	0	87	368,854,510
3040105	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	-	31	50,558,200	0	0	0	0	31	50,558,200
3050101	MESIN KETIK	-	1	1,500,000	0	0	0	0	1	1,500,000
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	191	519,810,674	0	0	0	0	191	519,810,674
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	-	33	496,961,075	0	0	0	0	33	496,961,075
3050201	MEUBELAIR	-	951	1,941,254,099	0	0	0	0	951	1,941,254,099
3050203	ALAT PEMBERSIH	-	10	37,998,100	0	0	0	0	10	37,998,100
3050204	ALAT PENDINGIN	-	84	192,149,250	0	0	0	0	84	192,149,250
3050205	ALAT DAPUR	-	1	12,150,000	0	0	0	0	1	12,150,000
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	47	856,922,723	0	0	0	0	47	856,922,723
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	13	162,584,000	0	0	0	0	13	162,584,000
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	-	47	790,778,740	0	0	0	0	47	790,778,740
3060105	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	-	28	677,916,140	0	0	0	0	28	677,916,140
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	-	4	152,186,250	0	0	0	0	4	152,186,250
3060207	ALAT-ALAT SANDI	-	1	27,697,762	0	0	0	0	1	27,697,762
3060310	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	-	1	7,150,000	0	0	0	0	1	7,150,000
3060343	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI	-	21	1,681,102,500	0	0	0	0	21	1,681,102,500
3070112	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	-	1	12,550,000	0	0	0	0	1	12,550,000
3070299	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	-	1	49,936,000	0	0	0	0	1	49,936,000
3080105	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	-	1	73,117,000	0	0	0	0	1	73,117,000
3080108	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	-	32	358,364,200	0	0	0	0	32	358,364,200
3080112	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	-	3	143,279,000	0	0	0	0	3	143,279,000
3080141	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	-	7	2,426,894,600	0	0	0	0	7	2,426,894,600
3080302	MODULAR COUNTING AND SCENTIFIC ELECTRONIC	-	1	20,014,400	0	0	0	0	1	20,014,400
3080305	SYSTEM/POWER SUPPLY	-	8	106,464,000	0	0	0	0	8	106,464,000
3080714	MOB	-	30	368,070,000	0	0	0	0	30	368,070,000
3090407	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	-	1	53,658,000	0	0	0	0	1	53,658,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

UAPB : 018 KEMENTERIAN PERTANIAN
UAKPB : 237242 BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

Tgl Data : 23/01/26 6:35 AM
 Tanggal : 23/01/26 2:14 PM
 Halaman : 2
 Kode Lap : lap_bmn_intra_skel_satker_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3090409	INSTRUMEN ANALISIS LAB FORENSIK	-	3	87,295,000	0	0	0	0	3	87,295,000
3100101	KOMPUTER JARINGAN	-	7	160,891,320	0	0	0	0	7	160,891,320
3100102	PERSONAL KOMPUTER	-	234	3,974,191,805	0	0	0	0	234	3,974,191,805
3100199	KOMPUTER UNIT LAINNYA	-	0	0	7	40,140,001	0	0	7	40,140,001
3100201	PERALATAN MAINFRAME	-	7	295,830,000	0	0	0	0	7	295,830,000
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	122	1,194,716,536	0	0	0	0	122	1,194,716,536
3100204	PERALATAN JARINGAN	-	51	651,315,000	0	0	0	0	51	651,315,000
3100299	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	-	1	32,863,380	0	0	0	0	1	32,863,380
3150404	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN	-	7	388,244,000	0	0	0	0	7	388,244,000
3150405	PERALATAN FASILITAS IISTRIK BANDAR UDARA	-	2	378,355,600	0	0	0	0	2	378,355,600
3190103	PERALATAN SENAM	-	3	80,250,000	0	0	0	0	3	80,250,000
133111	Gedung dan Bangunan		16	19,912,199,153	0	0	0	0	16	19,912,199,153
4010101	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	-	7	16,701,554,153	0	0	0	0	7	16,701,554,153
4010103	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	-	1	276,497,000	0	0	0	0	1	276,497,000
4010108	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	-	1	733,169,000	0	0	0	0	1	733,169,000
4010113	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	-	1	44,314,000	0	0	0	0	1	44,314,000
4010114	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	-	3	675,151,000	0	0	0	0	3	675,151,000
4010199	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	-	1	325,808,000	0	0	0	0	1	325,808,000
4010201	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	-	1	126,697,000	0	0	0	0	1	126,697,000
4010204	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	-	1	1,029,009,000	0	0	0	0	1	1,029,009,000
134111	Jalan dan Jembatan		601	924,217,000	0	0	0	0	601	924,217,000
5010109	JALAN KHUSUS	-	601	924,217,000	0	0	0	0	601	924,217,000
134112	Irigasi		1	34,363,000	0	0	0	0	1	34,363,000
5020605	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	-	1	34,363,000	0	0	0	0	1	34,363,000
135121	Aset Tetap Lainnya		394	434,112,500	0	0	0	0	394	434,112,500
6010101	BUKU	-	46	38,785,000	0	0	0	0	46	38,785,000
6010102	SERIAL	-	35	37,950,000	0	0	0	0	35	37,950,000
6010201	AUDIO VISUAL	-	303	304,067,500	0	0	0	0	303	304,067,500
6010301	BAHAN KARTOGRAFI	-	10	53,310,000	0	0	0	0	10	53,310,000
TOTAL				56,780,635,812		40,140,001		0		56,820,775,813

Bogor, 23 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

ASDIANTO, S.P., M.T
197801012002121006

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) SEMESTER II TAHUN 2025

Kode dan Nama UAKPA : (237242) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
Kode dan Nama UAPPAW : (0200) Jawa Barat
Kode dan Nama Eselon 1 : (09) BRMP
Kode dan Nama K/L : (018) Kementerian Pertanian

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya	
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab			Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE			Ada
3	CaLK			Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECHEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak

Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah

		Ada	Tidak	Seharusnya
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)			
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNPB		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
	(Jika ada, sebutkan akun dan konfirmasi penyebabnya)			
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak

4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	√		Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		Tidak
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	0		Tidak

3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak

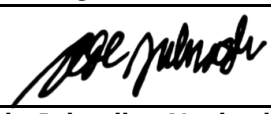
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud? Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai			Ya
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas			Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun : - Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca) - Beban Penyisihan Piutang (di LO) - Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	√ √ √ √		Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun : - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√ √	Ya/Tidak Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun : - Beban Persediaan (di LO)	√ √		Ya/Tidak Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun : - Akumulasi AT/AL (Neraca) - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√ √ √		Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	√		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ? Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya/Tidak Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ? Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya/Tidak Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X) - Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) - Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"</i>				
1 Saldo awal telah sesuai dengan saldo audited 2024 2 Neraca GLP dan Neraca Aset (Modul BMN) sudah sama 3 Pada menu To do list sudah oke 4 Rekon SAKTI - SPAN sudah tidak terdapat selisih untuk TDK Rupiah dan TDK COA 5 <i>CaLK SM 2 TA 2025 telah disusun, namun agar menambahkan penjelasan terkait kegiatan kerjasama Survey Investigasi desain (SIS) pada pengungkapan lainnya, serta menjelaskan nama dan nomor rekening (bank?) untuk menampung dana hibah pada penjelasan pos Kas Lainnya dan Setara Kas.</i> 6 Agar menjelaskan pengungkapan program prioritas Nasional pada CaLK				
Mengetahui Penyusun LK (Ade Julyadien Nashrullah) NIP. 199407182025051003		Bogor, 27 Januari 2026 Penelaah, Muhammad Hafni Rasyidha, SE NIP 198501122009011002		

| |

CATATAN HASIL REVIU (CHR)

Kementerian Pertanian			Disusun oleh/Tanggal	Kartika Yoga Prasetyani, SP., MP 28/01/2026
Inspektorat Jenderal			Direviu oleh/Tanggal	Ika Setiasih, S.P., M.Si 28/01/2026
			Direviu dan Disetujui oleh/Tanggal	Dr. Heni Nugraha, S.E., M.M. 29/01/2026
UAPA	018	Kementerian Pertanian		
UAPPA-E1	09	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		
UAPPA/B-W	0200	Jawa Barat		
UAKPA	237242	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian		
Uraian Catatan Hasil Reviu				Indeks KKR
A	Penyelenggaraan Akuntansi			
	Penyelenggaraan akuntansi telah sesuai ketentuan yang berlaku dan telah didukung dengan sarana yang memadai.			
	Rekonsiliasi dengan KKPN sudah didukung surat hasil rekonsiliasi (SHR).			
	Tidak terdapat permasalahan pada To Do List.			
B	Penyajian LK:			
	1. LRA			KKR LRA
	Realisasi PNBPN sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp537.164.549,00 atau sebesar 849,27% dari target senilai Rp63.250.000,00			
	Realisasi Belanja senilai Rp12.750.294.395,00 atau 95,31% dari alokasi anggaran senilai Rp13.377.417.000,00 dan tidak terdapat selisih antara nilai belanja pada SPAN dan SAKTI.			
	2. LO			KKR LO
	Nilai pendapatan di LO senilai Rp515.762.494,00 sedangkan nilai pendapatan di LRA senilai Rp537.164.549,00, atau terdapat perbedaan senilai Rp21.402.055,00 yang merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp16.189.100.00 dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya senilai Rp5.213.000.00.			
	Beban pegawai pada LO senilai Rp3.755.359.535,00 sama dengan realisasi belanja pegawai di LRA senilai Rp3.755.359.535,00.			
	Nilai Beban persediaan, Beban pemeliharaan, Beban barang dan jasa dan Beban perjalanan dinas pada LO senilai Rp8.956.959.709,00, sedangkan realisasi belanja barang pada LRA senilai Rp8.954.794.859,00 atau terdapat perbedaan senilai Rp2.164.850,00 yang merupakan saldo awal persediaan pada periode 01 Januari 2025.			
	3. LPE			KKR LPE
	Nilai akun DDEL senilai Rp11.375.583.724,00			
	Nilai akun DKEL senilai Rp537.164.549,00			
	Tidak terdapat transfer masuk dan transfer keluar			
	4. Neraca			KKR Neraca
	Saldo kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp0,00 dan telah sesuai dengan Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.			
	Kas lainnya dan setara kas senilai Rp1.268.795.776,00 merupakan dana Hibah dari 3 kegiatan yaitu ACIAR senilai Rp344.867.494,00; AFACI senilai Rp364.990.316,00, dan KOAT senilai Rp558.937,966,00 untuk pelaksanaan kegiatan yang berlanjut pada TA. 2026.			
	Terdapat piutang bukan pajak senilai Rp20.205.000,00 merupakan sisa saldo piutang pengembalian belanja pegawai TAYL berupa pengembalian tunjangan fungsional eks peneliti a.n Anggri Hervani.			
	Saldo persediaan senilai Rp481.000,00 sesuai dengan stock opname persediaan BA nomor B-3964/PL.020/H.10/12/2025 Tanggal 31 Desember 2025.			

Aset tetap senilai Rp29.527.109.845,00 terdiri dari Tanah senilai Rp13.152.236.000,00; Peralatan dan Mesin senilai Rp22.363.648.160,00; Gedung dan Bangunan senilai Rp19.912.199.153,00, Aset tetap lainnya senilai Rp434.112.500,00 dan Jalan Irigasi Jaringan senilai Rp958.580.000,00.		
Terdapat mutasi tambah PM senilai Rp40.140.001,00, berupa pembelian peralatan dan mesin (SSD, Hardisk dan VGA Card) sebanyak 7 unit. Terhadap aset tersebut belum dilakukan PSP.		
Terdapat Aset Tetap Lainnya senilai Rp434.112.500,00 berupa buku lainnya sebesar Rp38.785.000,00; Laporan sebesar Rp37.950.000,00; peta digital sebesar Rp304.067.500,00; dan peta (map) sebesar Rp53.310.000,00.		
Sampai dengan periode 31 Desember 2025, pelaksanaan inventarisasi BMN masih dalam proses.		
5. CaLK		KKR CaLK
CaLK telah disusun dengan memadai		
6. CaLBMN		KKR CaLBMN
CaLBMN telah disusun dengan memadai		
Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui		
1	Melanjutkan road map inventarisasi BMN.	
2	Mengajukan permohonan PSP terhadap peralatan dan mesin berupa SSD, Hardisk dan VGA Card sebanyak 7 unit senilai Rp40.140.001,00.	
Pereviu		Petugas Modul GLP
 Kartika Yoga Prasetyani		 Ade Julyadien Nashrullah HP: 081259755517
		Petugas SIMAK BMN
		 Tulus Arizon Pratama Simanullang HP: 081265932671